



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Kanwil DJKN DKI Jakarta
2025

KATA PENGANTAR



Dodok Dwi Handoko
Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) DKI Jakarta dapat menuntaskan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025. Laporan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis yang diwujudkan dalam pengukuran kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta selama satu tahun. Pada tahun 2025, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta mencapai 116.66% (seratus enam belas koma enam puluh enam persen). Nilai yang terdiri atas capaian kinerja pada masing-masing perspektif yaitu *stakeholder perspective* (114.05%), *customer perspective* (116.44%), *internal business process perspective* (118.68%), dan *learning and growth perspective* (117,95%), dengan capaian IKU keseluruhan melampaui target dengan status IKU hijau.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2025 ini, diperoleh gambaran yang jelas dan lugas mengenai kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam upaya pencapaian visi dan misi DJKN. Kanwil DJKN DKI Jakarta senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna layanan dengan dilandasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Kanwil DJKN DKI Jakarta berhasil mempertahankan Keberlanjutan Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI- WBBM) pada tahun 2025, dan tetap berkomitmen mempertahankan di tahun-tahun selanjutnya. Kanwil DJKN DKI Jakarta menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak terkait atas kerja sama yang baik dan sinergisitas, serta atas dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta.

Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta



Ditandatangani secara elektronik
Dodok Dwi Handoko



DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
C. Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta	6
D. Sistematika Laporan	8

BAB II Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis	9
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	19
D. Pengukuran Kinerja	21

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Kinerja Lainnya	58
C. Realisasi Anggaran	60
D. Inovasi	61
E. Penghargaan dan Achievement	64

BAB IV Penutup

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel	3.1	Formulir Pengukuran Kinerja	24
Tabel	3.2	Trajectory IKU Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	25
Tabel	3.3	Perbandingan target dan realisasi IKU Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	26
Tabel	3.4	Trajectory IKU Indeks Integritas	27
Tabel	3.5	Perbandingan target dan realisasi IKU Indeks integritas	28
Tabel	3.6	Trajectory IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	29
Tabel	3.7	Realisasi PNBPN Pengelolaan BMN masing-masing KPKNL	29
Tabel	3.8	Realisasi PNBPN Biad PN masing-masing KPKNL	30
Tabel	3.9	Realisasi PNBPN Bea Lelang masing-masing KPKNL	30
Tabel	3.10	Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	32
Tabel	3.11	Trajectory IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	33
Tabel	3.12	Perbandingan target dan realisasi kinerja IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	34
Tabel	3.13	Trajectory IKU Persentase realisasi pokok lelang	34
Tabel	3.14	Realisasi pokok lelang masing-masing KPKNL	35
Tabel	3.15	Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase realisasi pokok lelang	35
Tabel	3.16	Trajectory IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	37
Tabel	3.17	Realisasi Penurunan Saldo Piutang Negara masing-masing KPKNL	37
Tabel	3.18	Trajectory IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	39
Tabel	3.19	Trajectory IKU Tingkat kompetensi penilai pemerintah	39
Tabel	3.20	Trajectory IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	40
Tabel	3.21	Realisasi Sertifikasi masing-masing KPKNL	41
Tabel	3.22	Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	41
Tabel	3.23	Trajectory IKU Persentase evaluasi kinerja BMN	42
Tabel	3.24	Rincian Realisasi Kinerja BMN masing-masing KPKNL	43
Tabel	3.25	Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)	43
Tabel	3.26	Trajectory IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	45
Tabel	3.27	Rincian Realisasi Saldo BKPN masing-masing KPKNL	45
Tabel	3.28	Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	46
Tabel	3.29	Trajectory IKU Tingkat kualitas layanan penilaian	47
Tabel	3.30	Rincian Realisasi Tingkat Kualitas Layanan masing-masing KPKNL	47
Tabel	3.31	Perbandingan target dan realisasi IKU Tingkat kualitas layanan penilaian	48
Tabel	3.32	Trajectory IKU Persentase produktivitas lelang	49
Tabel	3.33	Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase produktivitas lelang	49

Tabel	3.34	Trajectory IKU Indeks kualitas kinerja anggaran	51
Tabel	3.35	Perbandingan target dan realisasi IKU Indeks kualitas kinerja anggaran	51
Tabel	3.36	Trajectory IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	52
Tabel	3.37	Trajectory IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai	53
Tabel	3.38	Perbandingan target dan realisasi IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai	53
Tabel	3.39	Trajectory IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	54
Tabel	3.40	Perbandingan target dan realisasi IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	55
Tabel	3.41	Trajectory IKU Indeks penanganan permasalahan hukum	55
Tabel	3.42	Trajectory IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	56
Tabel	3.43	Trajectory IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	58
Tabel	3.44	Rincian Realisasi DIPA	61
Tabel	3.45	Indeks Capaian IKU IKA 2025	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi Kanwil DJKN DKI Jakarta	4
Gambar	1.2	Komposisi Pegawai Kanwil DJKN DKI Jakarta	5
Gambar	1.3	Wilayah Kerja dan Layanan Kanwil DJKN DKI Jakarta	6
Gambar	2.1	Peta Strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta 2025	16
Gambar	2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
Gambar	2.3	Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2025	18
Gambar	2.4	Peta Strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta 2025	19
Gambar	2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	20
Gambar	3.1	Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN DKI Jakarta	22
Gambar	3.2	Ikhtisar Capaian Kinerja	22
Gambar	3.3	Tren NKO Kanwil DJKN DKI Jakarta	23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Kinerja sebagai alat kendali dan penilai kinerja secara kuantitatif merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Kanwil DJKN DKI Jakarta selaku instansi vertikal DJKN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kanwil DJKN DKI Jakarta membawahi 5 KPKNL, yaitu KPKNL Jakarta I sampai dengan KPKNL Jakarta V.

Kanwil DJKN DKI Jakarta satu-satunya Kanwil DJKN yang bertempat di Jakarta, sehingga mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan/operasional DJKN. Oleh karena itu, dalam mensukseskan peran strategis tersebut, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengemban visi DJKN yaitu: ***"Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif dan inovatif, dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan."*** Untuk mewujudkan visi tersebut DJKN menetapkan misi yaitu:

1. Mewujudkan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, efisiensi pengeluaran, optimalisasi penerimaan, dan pembiayaan dengan risiko minimum.
2. Meningkatkan tata kelola pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah yang dapat mewujudkan keseimbangan makro dalam pembangunan nasional melalui kebijakan investasi yang tepat, sehingga terjadi sinergi pemerintah, BUMN, dan sektor swasta.

3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
4. Melaksanakan pengelolaan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
6. Mengelola sumber daya untuk pengelolaan kekayaan negara dan investasi pemerintah secara efisien.
7. Mengembangkan proses bisnis berbasis digital yang responsif dengan perkembangan teknologi.

Untuk mengukur kinerjanya Kanwil DJKN DKI Jakarta menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC). BSC merupakan alat yang efektif untuk perencanaan strategis, alat untuk menterjemahkan misi, visi, tujuan, keyakinan dasar, nilai dasar, dan strategi organisasi ke dalam rencana tindakan (*action plans*) yang komprehensif, koheren, terukur, dan berimbang. Sebagai pengukuran kinerja, BSC mengukur penilaian kinerja berdasarkan IKU yang telah disusun dan ditetapkan untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Peta Strategis.

Tahun 2025 Kanwil DJKN DKI Jakarta berhasil menyelesaikan kinerjanya dengan baik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pada awal tahun anggaran. Dari 20 IKU *Kemenkeu-Two*, seluruh IKU dapat tercapai dan/atau melampaui dari target yang sudah ditetapkan. Rincian target dan realisasi IKU *Kemenkeu-Two* tersaji sebagai berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan tepercaya	1a.CP Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100.00%	120.00%	120.00	120.00
		1b.CP Indeks Integritas	100.00	105.32	105.32	105.32
		1c.CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	128.26%	128.26	120.00
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a.CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100.00%	117.31%	117.31	117.31
		2b.CP Persentase realisasi pokok lelang	100.00%	106.13%	106.13	106.13
		2c.CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100.00%	116.02%	116.02	116.02

3.	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a.N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74.00	105.88	143.07	120.00
		3b.N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70.00	96.00	137.14	120.00
4.	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a.CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100.00%	119.18%	119.18	119.18
		4b.N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100.00%	115.53%	115.53	115.53
5.	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a.CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	160.21%	160.21	120.00
		5b.CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70.00%	114.33%	163.32	120.00
		5c.CP	Persentase produktivitas lelang	80.00%	123.86%	154.83	120.00
6.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a.CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120.00	120.00	120.00
		6b.N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	125.22	125.22	120.00
		6c.N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80.00%	100.00%	125.00	120.00
7.	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a.CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	5.44	153.16	120.00
		7b.N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100.00	113.28	113.28	113.28
8.	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a.CP	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80.00	91.82	114.78	114.78
		8b.N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	100.00	119.63	119.63	119.63

Dengan Laporan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2025 ini kiranya dapat diperoleh gambaran yang jelas dan transparan tentang kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam upaya pencapaian visi dan misi DJKN. Kanwil DJKN DKI Jakarta senantiasa meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dengan dilandasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Laporan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk terus berkomitmen meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.



DJKN

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

C. Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta

D. Sistematika Laporan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kanwil DJKN DKI Jakarta dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama satu tahun yakni tahun 2025. LKj merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kanwil DJKN DKI Jakarta merupakan Unit Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kanwil DJKN DKI Jakarta berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kanwil DJKN DKI Jakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
- b. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi dan koordinasi pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi atas penatausahaan, penagihan, dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
- e. Pemberian bimbingan teknis, penggalan potensi, pemantauan, dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
- f. Pemberian pelayanan advokasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- g. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h. Pembinaan terhadap Penilai, Jasa Lelang dan Profesi Lelang;
- i. Penyiapan bahan bimbingan dan evaluasi kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
- j. Pelaksanaan pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, penilaian, dan lelang;
- k. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara; dan
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Adapun Kanwil DJKN DKI Jakarta terdiri dari:

1. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pemantauan program pemangku jabatan fungsional, pelaksanaan urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, perlengkapan, protokol, tata usaha, dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik negara dan area pelayanan terpadu di lingkungan kantor wilayah.

2. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara

Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan, pembinaan, penatausahaan, dan akuntansi di bidang kekayaan Negara serta mengoordinasikan penatausahaan barang milik negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di lingkungan Kantor Wilayah.

3. Bidang Piutang Negara

Bidang Piutang Negara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan pengurusan piutang Negara, dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara serta penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

4. Bidang Penilaian

Bidang Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan laporan penilaian, penyusunan basis data penilaian, pembinaan dan pengawasan terhadap penilai serta pelaksanaan kegiatan penilaian.

5. Bidang Lelang

Bidang Lelang mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, penggalan potensi dan pengembangan lelang serta verifikasi dan penatausahaan risalah lelang, pengawasan lelang, pelaksanaan pemeriksaan kinerja lelang dan pembukuan hasil lelang, pelaksanaan pengolahan data di bidang lelang dan bimbingan terhadap Profesi Lelang dan Jasa Lelang.

6. Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi

Bidang Kepatuhan Internal dan Hukum dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pelaksanaan penyiapan bahan rencana kerja, rencana strategik dan laporan akuntabilitas kinerja, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, penanganan perkara dan pemberian pendapat hukum, serta melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengawasan implementasi sistem aplikasi, penyajian informasi dan hubungan masyarakat.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Adapun struktur organisasi Kanwil DJKN DKI Jakarta dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kanwil DJKN DKI Jakarta

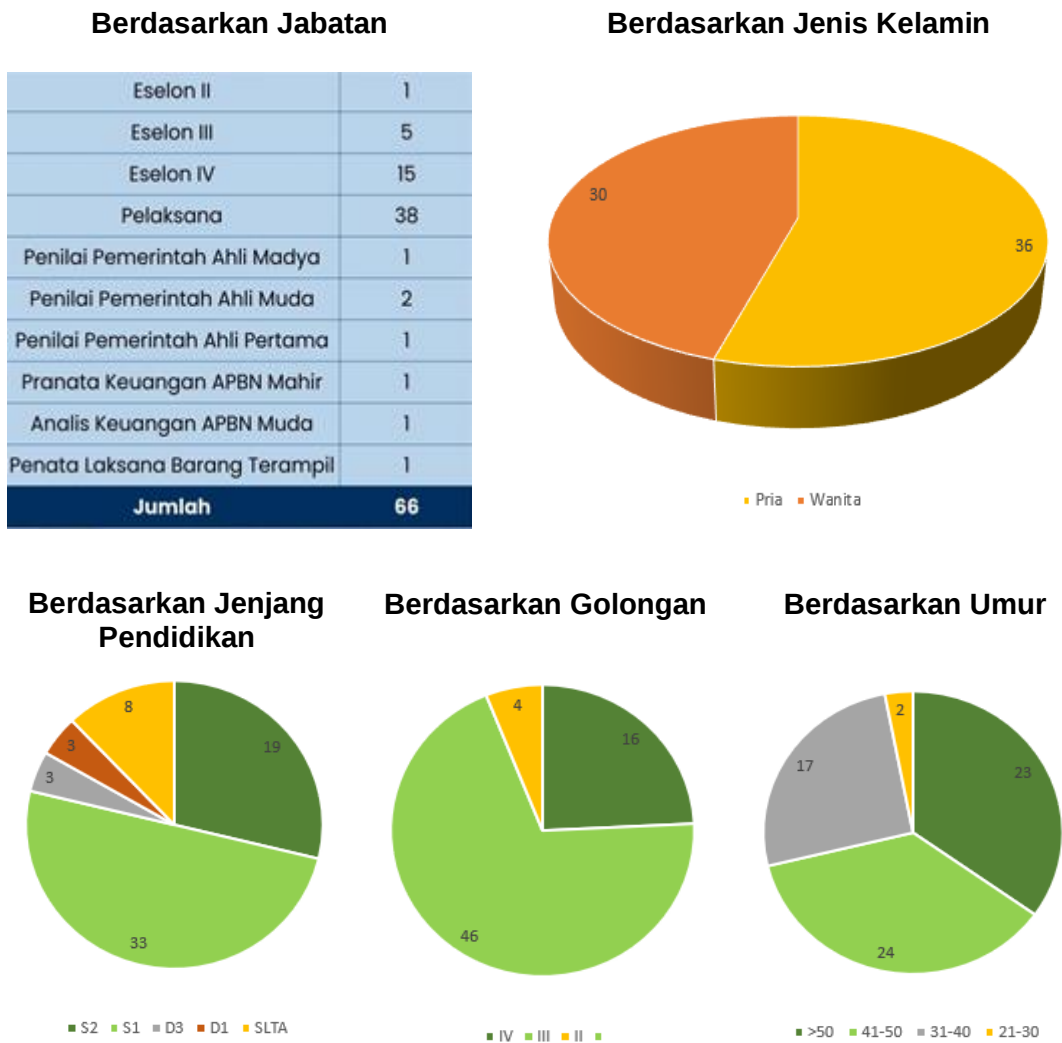


Dalam menjalankan tugasnya, Kanwil DJKN DKI Jakarta yang merupakan instansi vertikal Unit Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dibantu oleh Kepala Bagian Umum, 5 (lima) Kepala Bidang, 5 (lima) Kepala KPKNL, Pejabat Fungsional dan para pegawai dengan berbagai bidang keahlian.

Jumlah pegawai pada Kanwil DJKN DKI Jakarta, per 31 Desember 2025 berjumlah 66 (enam puluh enam) orang dengan komposisi pria dan wanita, masing-masing 36 (tiga puluh enam) pria dan 30 (tiga puluh) wanita. Selain itu Kanwil DJKN DKI Jakarta mengelola 42 (empat puluh dua) PNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

Adapun komposisi pegawai pada Kanwil DJKN DKI Jakarta per 31 Desember 2025 berdasarkan jenjang jabatan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, umur, dan golongan adalah sebagai berikut:

Gambar 1.2
Komposisi Pegawai Kanwil DJKN DKI Jakarta



Komposisi PPNPN	P	L	Total
Satpam	0	12	12
Pramubakti	2	2	4
Pengemudi	0	2	2
Tenaga Kebersihan	5	19	24
Jumlah	7	35	42

C. Peran Strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta

Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai slogan dalam bekerja yaitu MONAS, yang merupakan kepanjangan dari **M**elayani dengan profesi**O**nal, ama**NA**h dan **S**igap. Slogan MONAS didasarkan pada kedudukan Kanwil DJKN DKI Jakarta yang terletak di Provinsi DKI Jakarta dan tidak jauh dari lokasi Monumen Nasional. Selain itu, slogan Monas juga menggambarkan dedikasi, ketulusan dan kebanggaan Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam melayani masyarakat.

Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai wilayah kerja meliputi Provinsi DKI Jakarta yang membawahi 5 (lima) Kantor Pelayanan, yaitu:

1. KPKNL Jakarta I
2. KPKNL Jakarta II
3. KPKNL Jakarta III
4. KPKNL Jakarta IV
5. KPKNL Jakarta V

Gambar 1.3
Wilayah Kerja dan Layanan Kanwil DJKN DKI Jakarta



Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, supervisi, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang. Adapun peran strategis Kanwil DJKN DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara

Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai pengelola kekayaan negara di wilayah Provinsi DKI Jakarta, mempunyai peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, diutamakan pada utilisasi kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara, penyempurnaan peraturan, pembinaan dan penatausahaan kekayaan negara. Pengelolaan kekayaan negara pada tahun 2025 ditujukan pada percepatan sertifikasi tanah BMN, implementasi SBSK, implementasi evaluasi kinerja aset (portofolio aset), disamping tetap melaksanakan penatausahaan dan pengelolaan BMN lainnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku misalnya pengelolaan aset BUN yang terdiri atas aset eks BPPN, eks kelolaan PT PPA dan aset properti eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).

2. Optimalisasi Penataan Aset Menuju *Revenue Center*

Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu alternatif dalam menyokong APBN selain dari penerimaan sektor perpajakan. Upaya pemanfaatan BMN menjadi lini utama yang dilakukan dalam proses bisnis pengelolaan BMN dalam mengoptimalkan BMN *idle* dan aset BUN, sehingga mengubah *cost center* menjadi *revenue center*. Pemanfaatan BMN ini dilakukan tidak hanya atas aset yang ada pada entitas Kementerian/Lembaga (satker), namun juga aset yang dikelola oleh Pengelola Barang (DJKN).

3. Pengurusan Piutang Negara

Sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, piutang macet yang berasal dari BUMN/Perbankan tidak diserahkan lagi pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Namun demikian, pengurusan piutang negara di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta tetap dilaksanakan dengan tujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga.

4. Penilaian Kekayaan Negara

Pelaksanaan penilaian terhadap barang milik negara/barang milik daerah merupakan bagian dari optimalisasi pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah. Penilaian tersebut antara lain akan digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)/daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/barang milik daerah, penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan pengurusan piutang negara/daerah. Dengan

demikian, hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan barang milik negara/daerah yang optimal, efektif dan efisien.

5. Pelayanan Lelang

Lelang didefinisikan sebagai penjualan barang yang terbuka untuk umum tentunya memberikan manfaat dalam meningkatkan pendapatan bagi negara berupa PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak), serta melalui pelaksanaan lelang juga akan memberikan manfaat untuk meningkatkan perekonomian.

D. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2025 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis dan sistematika laporan.

3. Bab II. Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, dan penyusunan perjanjian kinerja tahun 2025 dan 2026.

4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi, realisasi anggaran, kinerja lainnya, inovasi dan penghargaan serta achievement.

5. Bab IV. Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.



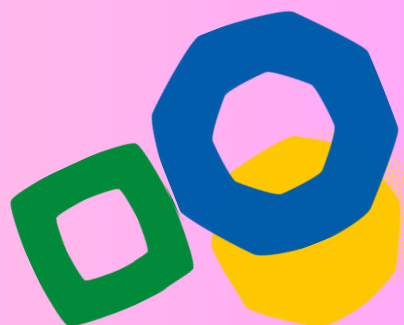
BAB II

Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis

B. Perjanjian Kinerja

C. Pengukuran Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*).

Rencana Strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki instansi vertikal di daerah menetapkan entitas selaku koordinator penyusunan Laporan Kinerja satuan kerja di wilayah yang bersangkutan.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: KEP-163/KN/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai. Agar tetap eksis dan konsisten serta mempunyai arah yang jelas dalam menentukan langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil dalam menjalankan tugas-tugas pokok, Kanwil DJKN DKI Jakarta tetap mengacu pada Visi yang telah ditetapkan yaitu : ***"Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif dan inovatif, dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan"***

Sebagai wujud penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, Kanwil DJKN DKI Jakarta memiliki 4 (empat) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.

3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategi organisasi sesuai tugas dan fungsi, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh Kanwil DJKN DKI merujuk pada tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode tahun 2025-2029 yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Dalam mencapai tujuan tersebut, Kanwil DJKN DKI Jakarta telah menentukan sasaran strategis yang ingin dicapai. Sasaran merupakan penjabaran tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan.
3. Layanan lelang yang modern dan tepercaya.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

Dalam sasaran strategis tersebut, masing-masing terdapat arah kebijakan sehingga untuk pencapaiannya diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Adapun arah kebijakan dan strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.

1.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional, strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan BMN berupa tanah.
- b. Penguatan Wasdal BMN melalui Pembinaan dan Tindak lanjut Pengelolaan BMN.
- c. Pengembangan Peta Tematik BMN dalam rangka Kebijakan Satu Peta melalui IGT BMN.
- d. Penguatan perencanaan kebutuhan BMN dalam penganggaran.
- e. Optimalisasi BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi KL.
- f. Penguatan Pengelolaan BMN berupa Rumah Negara.
- g. Pengelolaan BMN yang berkelanjutan dan adaptif terhadap bencana.
- h. Penyusunan kebijakan persiapan pelaksanaan pengelolaan BMN di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rangka persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara.
- i. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali BMN.
- k. Penguatan Peran Pengelolaan BMN dalam Fiskal dan Pembangunan Nasional.
- l. Penguatan kapasitas pembiayaan fiskal melalui penyediaan BMN sebagai *underlying asset* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- m. Penggunaan Daftar Tarif Pokok Sewa BMN dalam rangka percepatan layanan pemanfaatan BMN.

1.2 Arah Kebijakan Pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang akuntabel, strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara lain-lain (mencakup strategi IP asset, pengamanan asset, sertifikasi tanah, dan pengelolaan Kekayaan Negara Dikuasai).
- b. Peningkatan kualitas data kekayaan negara lain-lain melalui sistem yang terintegrasi.
- c. Peningkatan tata kelola kekayaan negara lain-lain melalui perbaikan

regulasi.

1.3 Arah Kebijakan Pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efektif untuk mendorong perekonomian dan pembangunan nasional, strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan melalui penyempurnaan regulasi dan penguatan pembinaan.
- b. Penguatan Tata Kelola dan Dukungan Pemerintah pada Lembaga Pengelola Investasi sebagai *Sovereign Wealth Fund* (SWF).
- c. Penguatan Tata Kelola dan Dukungan Pemerintah atas penugasan BUMN.
- d. Penguatan Sinergi Pengelolaan Investasi Pemerintah dengan BUMN/D, BPI Danantara, LPI/INA, dan Pemerintah Daerah serta negara lain/Lembaga Keuangan Internasional.
- e. Penguatan fungsi *Advisory* pengelolaan Investasi Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan BUMD dengan melibatkan kantor vertikal DJKN.

1.4 Arah Kebijakan Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara, strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Penyempurnaan regulasi dalam rangka mendukung proses bisnis pengurusan Piutang Negara yang telah diserahkan kepada PUPN dan pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga.
- b. Pengembangan system informasi di bidang Piutang Negara dengan penambahan fitur yang mendukung penatausahaan pengurusan piutang negara yang diserahkan kepada PUPN dan pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian/Lembaga.
- c. Penguatan sinergi dalam implementasi regulasi terkait pengurusan piutang Badan/Lembaga Khusus/Badan Hukum Publik.

1.5 Arah Kebijakan Peningkatan sinergi pengelolaan asset pemerintah pusat dan pemerintah daerah, strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Penyusunan rekomendasi kebijakan inventarisasi dan penilaian Barang

Milik Daerah (BMD).

- b. Pembentukan Asset Manager Forum (AMF) Regional/Nasional.

2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan dan relevan.

2.1 Arah Kebijakan Penguatan peran strategis layanan penilaian dan advisori untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah, strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Penguatan peran Kementerian Keuangan dalam mendukung pengelolaan SDA secara berkelanjutan melalui kegiatan valuasi ekonomi jasa ekosistem/ESV sebagai bagian dari instrument fiskal.
- b. Penguatan peran Kementerian Keuangan dalam pengelolaan asset pusat/daerah melalui kegiatan penilaian/analisis bisnis.
- c. Perumusan regulasi dan proses bisnis pelayanan advisori di bidang penilaian.
- d. Penguatan penilaian berbasisdata dan terintegrasi melalui pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP).
- e. Peningkatan ketergunaan alat bantu dan data penilaian untuk berbagai kepentingan.

3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya.

3.1 Arah Kebijakan Layanan Lelang yang efektif, efisien, inklusif dan kredibel guna menggerakkan perekonomian nasional, strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Transformasi desain dan digitalisasi proses bisnis layanan Lelang.
- b. Implementasi layanan lelang melalui penyempurnaan platform lelang.
- c. Interkoneksi layanan lelang dalam rangka meningkatkan kemudahan dan efisiensi proses bisnis lelang melalui kerja sama dengan mitra lelang.
- d. Partisipasi masyarakat melalui edukasi publik, perluasan akses pasar, dan, inklusifitas bagi pelaku ekonomi.
- e. Koordinasi dengan pihak/lembaga yang terlibat dalam lelang dan/ atau memiliki kewenangan dalam penegakan hukum.
- f. Peningkatan kompetensi Pejabat Lelang melalui *capacity building* dan uji kualitas yang berkelanjutan.

- g. Sinergi sumber daya pendukung layanan lelang guna kemudahan dan percepatan layanan lelang.
 - h. Pengembangan dan optimalisasi layanan lelang hak menikmati guna mendukung penerimaan negara dari pengelolaan asset.
 - i. Integrasi dan pemanfaatan geospasial dalam rangka meningkatkan minat dan partisipasi peserta lelang guna mendukung peningkatan penerimaan negara.
 - j. Optimalisasi peran Kanwil dan KPKNL dalam pelaksanaan strategi edukasi dan komunikasi layanan lelang aset negara termasuk pemanfaatan kanal digital.
 - k. Peningkatan sinergi dan peran swasta dalam penyelenggaraan lelang dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.
- 4.1 Arah Kebijakan Organisasi dan SDM yang optimal, strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:
- a. Penataan unit yang menangani jenis aset dengan kompleksitas tinggi dan sifat penugasan khusus.
 - b. Pengkategorian kantor pelayanan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik unit.
 - c. Pengembangan karir SDM yang selaras dengan kompetensi individu (*Job Matching*) dan kebutuhan capaian program pengelolaan kekayaan negara.
 - d. Perbaikan dan pemenuhan Standar Kompetensi SDM dengan mengoptimalkan Assesmen dan Implementasi Manajemen Pengetahuan melalui dokumentasi *tacit and explicit knowledge* dan *penguatan Community of Practice (CoP)*.
 - e. Harmonisasi dan optimalisasi pemenuhan kebutuhan SDM baik Struktural maupun Jabatan Fungsional dalam program pengelolaan kekayaan negara.
 - f. Pembentukan *Human Capital Frame Work* DJKN.
 - g. Penyempurnaan proses bisnis DJKN secara berkelanjutan melalui

simplifikasi, integrasi *end-to-end*, standardisasi layanan, dan pembaruan SOP/ABK berbasis data, dengan dukungan SPBE/TIK.

4.2 Arah Kebijakan Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Pemutakhiran infrastruktur dan Tata Kelola TIK melalui penyusunan *Grand Design* Teknologi Informasi dan Komunikasi DJKN.
- b. Simplifikasi, reengineering, dan integrasi sistem aplikasi DJKN
- c. Penguatan integritas data sebagai fondasi transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan.
- d. Implementasi data analitik dan *Artificial Intelligence*.
- e. Penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan pengelolaan dan pengendalian keamanan informasi, penerapan *data security*, dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi.
- f. Pengukuran Tingkat Maturitas Pengelolaan TIK DJKN.

4.3 Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, strategi yang dilakukan untuk mewujudkannya adalah:

- a. Penerapan Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi melalui penyusunan dan evaluasi secara berkala *Risk Control Matrix* seluruh Sasaran Strategis dan proses bisnis terkait.
- b. Peningkatan peran Lini Pertama dalam melakukan pengawasan dan pembinaan pegawai melalui pengawasan melekat.

B. Perjanjian Kinerja

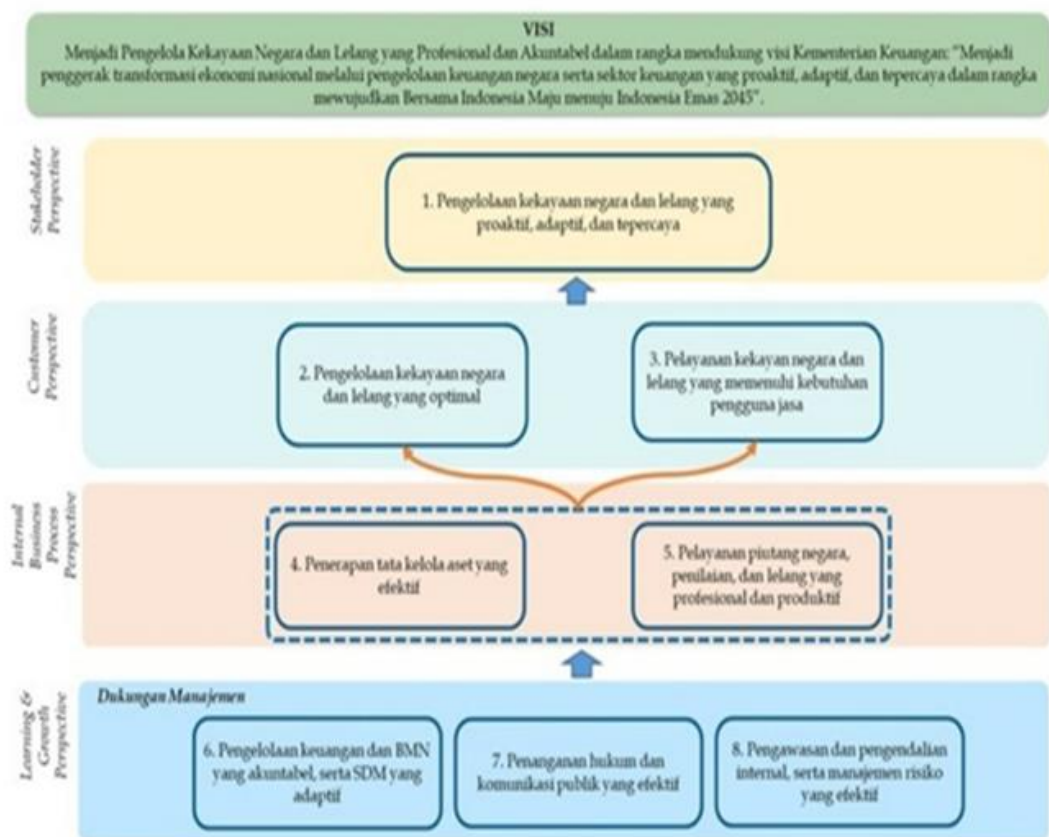
1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun.

Peta strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta mempunyai 4 perspektif, yaitu: *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal business process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Dari peta strategi Kanwil DJKN Tahun 2025 tersebut terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat dilihat dalam tabel berikut:

Gambar 2.1
Peta Strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta 2025



Adapun gambaran penetapan kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2025 dijabarkan dalam 8 (delapan) Sasaran Strategis yang dicapai melalui penetapan 20 (dua puluh) target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Gambar 2.2

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Indeks integritas	100
		1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp664,53 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp12,92 T)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,57 T)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-CP Persentase kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3,55
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program/Kegiatan Tahun 2025:

1. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

- a. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi
- b. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko
- c. Pengelolaan Aset
- d. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif

2. Program Dukungan Manajemen

- a. Legislasi dan Litigasi
- b. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum
- c. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
- d. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal

2. Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2025 tanggal 13 Juni 2025 Tentang Mutasi, Pengangkatan dan Pengukuhan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta Bapak Arif Bintarto Yuwono mendapat alih tugas menjadi Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan digantikan oleh Bapak Dodok Dwi Handoko.

Pada periode triwulan 4 (Q4) tahun 2025 terdapat adendum target IKU Persentase penurunan nilai saldo piutang negara. Target awal 100% dengan raw data **Rp2,577,381,000,000.00** (dua triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah) menjadi 100% dengan raw data **Rp3,322,383,924,000.00** (tiga triliun tiga ratus dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Gambar 2.3

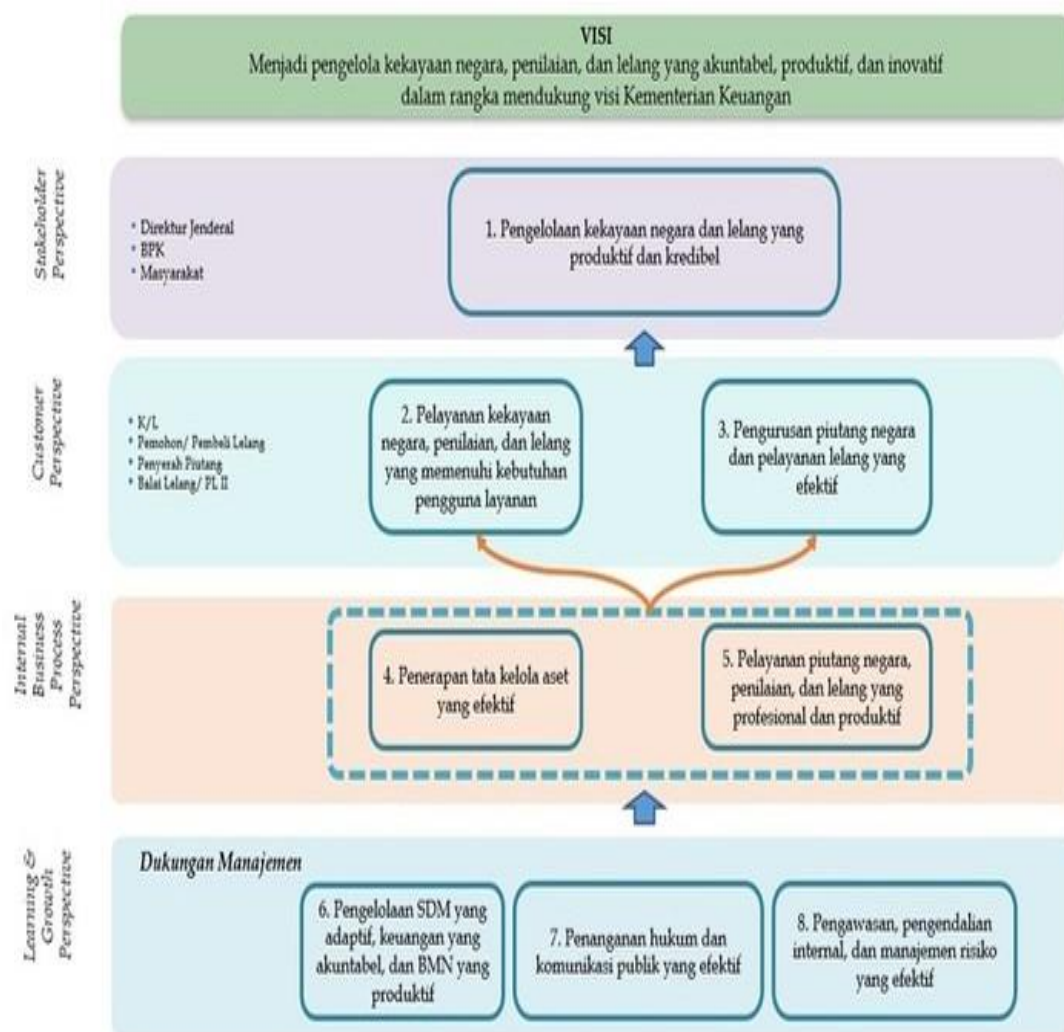
**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP	Indeks integritas	100
		1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp664,53 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,32 T)
		2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp12,92 T)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
		3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5b-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
		5c-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Penetapan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2026 dijabarkan dalam 8 (delapan) Sasaran Strategis yang dicapai melalui penetapan 20 (dua puluh) target Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun gambaran Penetapan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2026 dalam Peta Strategi dan Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Gambar 2.4
Peta Strategi Kanwil DJKN DKI Jakarta 2026



Gambar 2.5

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp682,4M)
2	Pelayanan Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan	2a-CP	Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN Berupa Tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
		2c-N	Persentase standarisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%
3	Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2T)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp12,5T)
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83
		8c-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	95.6%

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko
3. Pengelolaan Aset
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif

Program:

Dukungan Manajemen

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi
2. Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal

D. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, Kanwil DJKN DKI Jakarta berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120% (seratus dua puluh persen)
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120% (seratus dua puluh persen);
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Kinerja Lainnya

C. Realisasi Anggaran

D. Inovasi

E. Penghargaan dan Achievement



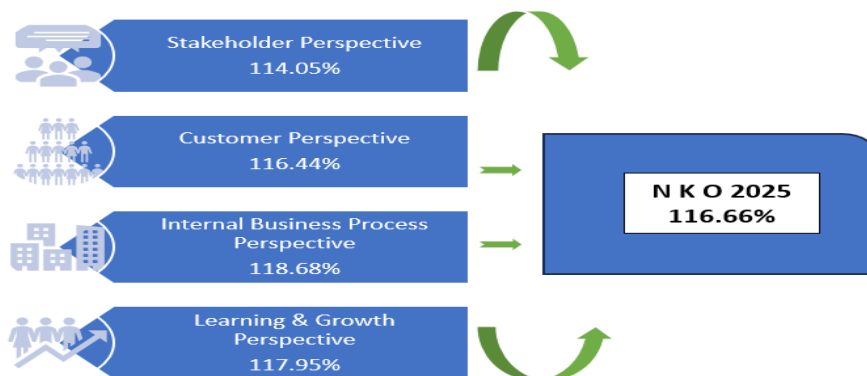
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2025 sebesar 116.66%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif sebagai berikut:

Gambar 3.1
Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN DKI Jakarta



Selama tahun 2025, Kanwil DJKN DKI Jakarta memiliki capaian 20 IKU dengan status hijau.

Gambar 3.2
Ikhtisar Capaian Kinerja



Catatan Status NKO:

$100 \leq x \leq 120$ = memenuhi ekspektasi

$80 \leq x < 100$ = belum memenuhi ekspektasi

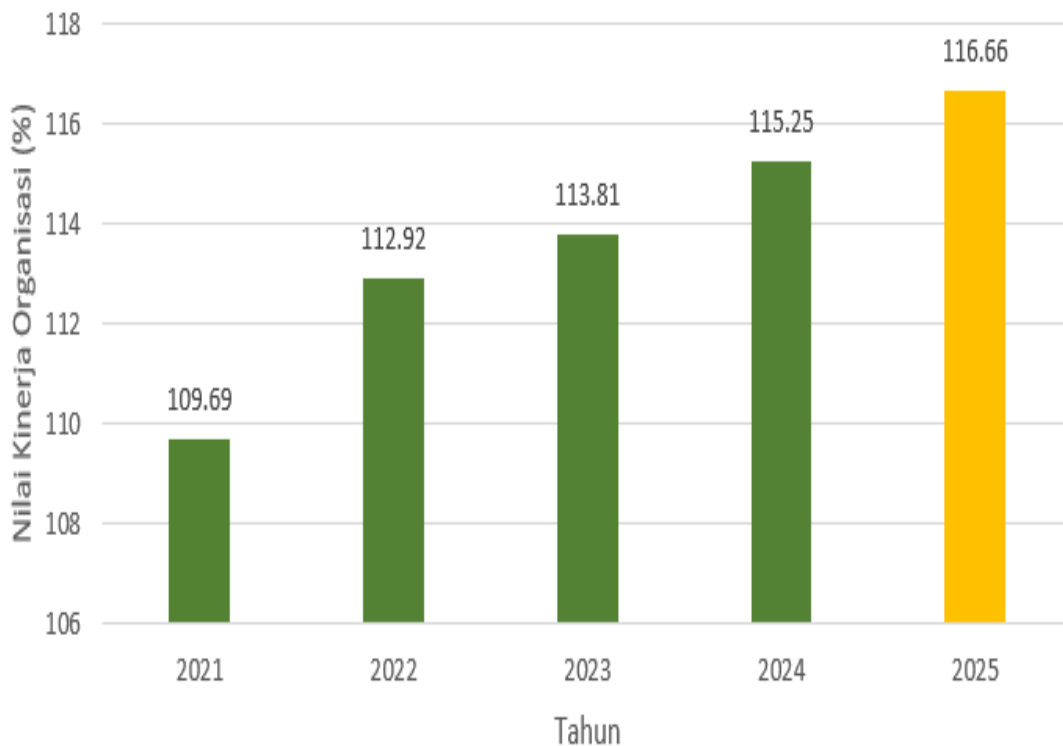
$x < 80$ = tidak memenuhi ekspektasi

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2025 Kanwil DJKN DKI Jakarta telah menetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Tahun 2025, keseluruhan IKU Kanwil DJKN DKI Jakarta dapat tercapai atau status hijau.

Adapun tren capaian IKU pada Kanwil DJKN DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Gambar 3.3

TREN NKO KANWIL DJKN DKI JAKARTA



Tabel 3.1
Formulir Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Kanwil DJKN DKI Jakarta
Tahun Anggaran : 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif dan terpercaya	1a.CP Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100.00%	120.00%	120.00	120.00
		1b.CP Indeks Integritas	100.00	105.32	105.32	105.32
		1c.CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	128.26%	128.26	120.00
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a.CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100.00%	117.31%	117.31	117.31
		2b.CP Persentase realisasi pokok lelang	100.00%	106.13%	106.13	106.13
		2c.CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100.00%	116.02%	116.02	116.02
3.	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a.N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74.00	105.88	143.07	120.00
		3b.N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70.00	96.00	137.14	120.00
4.	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a.CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100.00%	119.18%	119.18	119.18
		4b.N Persentase evaluasi kinerja BMN	100.00%	115.53%	115.53	115.53
5.	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a.CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	160.21%	160.21	120.00
		5b.CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70.00%	114.33%	163.32	120.00
		5c.CP Persentase produktivitas lelang	80.00%	123.86%	154.83	120.00
6.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a.CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100	120.00	120.00	120.00
		6b.N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	125.22	125.22	120.00
		6c.N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80.00%	100.00%	125.00	120.00
7.	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a.CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	5.44	153.16	120.00
		7b.N Indeks penanganan permasalahan hukum	100.00	113.28	113.28	113.28
8.	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a.CP Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80.00	91.82	114.78	114.78
		8b.N Indeks capaian unit kera dalam keberlanjutan pembangunan ZI WBK/WBBM	100.00	119.63	119.63	119.63

Adapun hasil analisis terhadap pencapaian setiap Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai mandat dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DJKN melaksanakan tugas tersebut secara adaptif dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, proaktif dalam mengembangkan kebijakan dan inovasi layanan, serta terpercaya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU sebagai berikut:

a. **IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan**

Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan dan Pengguna Layanan Kemenkeu (SKPKPL) merupakan tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada masyarakat, pengguna layanan, dan *stakeholders*.

IKU terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan/*Stakeholder* (IKPK)
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL)
3. Tingkat Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024

Target IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2025 yang telah ditetapkan adalah **100%**, dengan realisasi sebesar **120%** atau capaiannya sebesar **120%**. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Trajectory IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan

K-Two	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%	Max
Realisasi	53.85%	92.31%	92.31%	92.31%	92.31%	120%	120%	
Capaian	269.25%	184.62%	184.62%	131.87%	131.87%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

IKU Indeks Kepuasan Stakeholder dan Pengguna Layanan berhasil dicapai oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta karena tindakan yang dilakukan antara lain:

1. Menyediakan sarana dan prasarana untuk kenyamanan dan keamanan pengguna layanan.
2. Melaksanakan sosialisasi anti gratifikasi internal dan eksternal.
3. Publikasi saluran pengaduan masyarakat melalui media sosial atas layanan yang dilakukan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta.
4. Penyampaian laporan berkala mengenai tindak lanjut pengelolaan saluran pengaduan yang dilaporkan oleh pengelola pengaduan kepada pimpinan unit.

Adapun rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada tahun mendatang:

1. Berupaya terus meningkatkan pelayanan kepada stakeholder.
2. Pelaksanaan tindak lanjut SKPL 2024, antara lain sosialisasi antikorupsi, dan sosialisasi pelayanan prima.
3. Monitoring tindak lanjut rekomendasi SKPL 2024.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu dan Standar Nasional tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 3.3

Perbandingan target dan realisasi IKU Tingkat kepuasan *stakeholder* dan pengguna layanan

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	4.20	4.20	100	-	120%
2024	100%	4.20	4.20	4.20	-	112.19%
2023	100%	4.15	4.15	4.15	-	106.40%
2022	4.88	4.10	4.10	4.10	-	4.89
2021	4.27	4.05	4.05	4.05	-	4.87

Sesuai tabel di atas, terlihat perbandingan antara target dan realisasi yang terus meningkat antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 sesuai PMK 70 Tahun 2025 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sesuai PMK 77/PMK.01/2020, serta Rencana Kerja Tahunan Kementerian Keuangan, adapun Standar Nasional tidak dapat dibandingkan.

b. IKU Indeks Integritas

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan atau sesuai dengan ketentuan KPK dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Dalam hal KPK memberikan arahan untuk mengubah komponen penilaian atau terdapat penyesuaian didalamnya maka perhitungan disesuaikan dengan arahan KPK. Pada Tahun 2025, KPK tidak melaksanakan survei penilaian integritas dikarenakan efisiensi sehingga tahun 2025 hanya dari Tindak Lanjut Survei Penilaian Integritas tahun 2024 saja.

Target IKU Indeks integritas Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2025 yang telah ditetapkan adalah **100**, sedangkan realisasi sebesar **105.32** atau capaiannya sebesar **105.32%** dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Trajectory IKU Indeks Integritas

K-Two	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1b-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	100	117	117	120	120	105.32	105.32	
Capaian	100%	117%	117%	120%	120%	105.32%	105.32%	
Nilai Kinerja	100%	117%	117%	120%	120%	105.32%	105.32%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Tindakan yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian IKU Indeks Integritas yaitu memenuhi *action plan* hasil SPI Tahun 2024 pada triwulan III mencakup:

1. Campaign/internalisasi pencegahan pelanggaran disiplin.
2. Pemetaan/Identifikasi benturan kepentingan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
3. Melakukan pemantauan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi.
4. Pelatihan/internalisasi mengenai mekanisme dan prosedur layanan serta pengelolaan pengaduan.
5. Publikasi infografis layanan sebagai bentuk edukasi/sosialisasi prosedur layanan kepada pengguna layanan.

Adapun rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada tahun mendatang adalah melaksanakan monitoring tindak lanjut rekomendasi SPI 2024.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu dan Standar Nasional tahun 2023 sampai dengan 2025.

Tabel 3.5
Perbandingan target dan realisasi IKU Indeks integritas

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	100	100	100	-	105.32%
2024	89.17	92	92	92	-	103.67%
2023	88.67	91.5	91.5	91	-	100.56%
2022	-	91	91	-	-	-
2021	-	90.5	90.5	-	-	-

Sesuai tabel di atas, dapat terlihat perbandingan antara target dan realisasi antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN dan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Keuangan. Adapun Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sesuai PMK 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 sesuai PMK 70 Tahun 2025, namun Standar Nasional tidak dapat dibandingkan.

c. IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

- 1). PNBP Kekayaan Negara (PNBP Aset)
- 2). PNBP Piutang Negara (PNBP PN)
- 3). PNBP Lelang

Target IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2025 telah ditetapkan **100%** atau **Rp664,533,455,000.00** (enam ratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), sedangkan realisasinya sebesar **128.26%** atau **Rp852,316,132,115.28** (delapan ratus lima puluh dua miliar tiga ratus enam belas juta seratus tiga puluh dua ribu seratus lima belas rupiah dua puluh delapan sen) dengan capaiannya sebesar **128.26%** dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6

Trajectory IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

K-Two	1. Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max
Realisasi	190.77%	130.74%	125.32%	125.32%	125.32%	128.26%	128.26%	
Capaian	203.74%	130.83%	130.83%	125.32%	125.32%	128.26%	128.26%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut realisasi masing-masing PNBPN secara rinci per KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Realisasi PNBPN Pengelolaan BMN masing-masing KPKNL

Realisasi PNBPN dari Pengelolaan BMN			
			

Unit	Target Q4	Realisasi Desember	% Capaian thd Q4
KPKNL Jakarta I	Rp 94,584,750,000.00	Rp 113,126,676,358.00	119.60%
KPKNL Jakarta II	Rp 178,233,650,000.00	Rp 243,646,451,904.00	136.70%
KPKNL Jakarta III	Rp 57,133,460,000.00	Rp 81,847,457,459.00	143.26%
KPKNL Jakarta IV	Rp 52,807,460,000.00	Rp 76,999,333,566.00	145.81%
KPKNL Jakarta V	Rp 60,245,680,000.00	Rp 73,236,206,572.00	121.56%
Total Target/Realisasi	Rp 443,005,000,000.00	Rp 588,856,125,859.00	132.92%

Tabel 3.8
Realisasi PNBPN Biad PN masing-masing KPKNL

Realisasi PNBPN dari Biad Piutang Negara			
--	--	--	--

Unit	Target Q4	Realisasi Desember	% Capaian thd Q4
KPKNL Jakarta I	Rp 6,578,455,000.00	Rp 3,556,120,425.24	54.06%
KPKNL Jakarta II	Rp 2,000,000,000.00	Rp 8,829,619,893.64	441.48%
KPKNL Jakarta III	Rp 4,000,000,000.00	Rp 5,529,687,473.00	138.24%
KPKNL Jakarta IV	Rp 5,500,000,000.00	Rp 8,554,312,105.00	155.53%
KPKNL Jakarta V	Rp 18,000,000,000.00	Rp 39,308,378,730.40	218.38%
Total	Rp 36,078,455,000.00	Rp 65,778,118,627.28	182.32%

Tabel 3.9
Realisasi PNBPN Bea Lelang masing-masing KPKNL

Realisasi PNBPN dari Bea Lelang			
---------------------------------	--	--	--

Unit	Target Q4	Realisasi Desember	% Capaian thd Q4
KPKNL Jakarta I	Rp 24,600,000,000.00	Rp 20,983,712,765.00	85.30%
KPKNL Jakarta II	Rp 24,000,000,000.00	Rp 32,297,837,553.00	134.57%
KPKNL Jakarta III	Rp 29,000,000,000.00	Rp 33,152,599,121.00	114.32%
KPKNL Jakarta IV	Rp 27,610,000,000.00	Rp 17,574,447,676.00	63.65%
KPKNL Jakarta V	Rp 32,900,000,000.00	Rp 34,901,298,223.00	106.08%
PL II	Rp 47,340,000,000.00	Rp 58,517,385,726.00	123.61%
Total	Rp 185,450,000,000.00	Rp 197,427,281,064.00	106.46%

Berdasarkan rincian realisasi di atas, realisasi PNBPN biad piutang negara KPKNL Jakarta I masih merah dan realisasi PNBPN dari bea lelang pada KPKNL Jakarta I dan KPKNL Jakarta IV belum tercapai (warna kuning dan merah), namun demikian, realisasi PNBPN biad piutang negara dan PNBPN dari bea Lelang Kanwil DJKN DKI Jakarta secara keseluruhan telah tercapai. Penyebab dan upaya yang telah dilakukan KPKNL terkait realisasi yang berwarna merah dan kuning ini adalah sebagai berikut:

KPKNL Jakarta I:

Penyebab:

1. Terdapat beberapa lelang pasal 6 UUHT nilai limitnya sudah berupa nilai likuidasi dan berpontesi laku namun oleh pemohon lelang dibatalkan karena ada penyelesaian.
2. Terdapat rencana lelang AYDA BPR namun debitor dipailitkan.

Upaya yang telah dilakukan:

Penggalan potensi lelang ke perbankan, BUMN/BUMD di wilayah kerja, dan sosialisasi lelang AYDA ke BPR.

KPKNL Jakarta IV:

Penyebab:

1. Terdapat beberapa jenis lelang yang kontribusinya tidak besar terhadap pencapaian target PNBPN Lelang, karena tidak memungut Bea Lelang Penjual, contohnya Lelang eksekusi Barang Rampasan dan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN. Di sisi lain, penetapan target PNBPN Lelang tahun 2025 secara prosentase jauh lebih besar dari penetapan target pokok lelang. Idealnya target PNBPN Lelang maksimal 3 atau 4 persen dari target pokok lelang.
2. Adanya pemohon lelang eksekusi Hak Tanggungan yang berganti nama, yaitu PT. Bank KB Bukopin, Tbk. menjadi PT. Bank KB Indonesia, Tbk. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya potensi pelaksanaan lelang dari bank tersebut karena pihak bank tidak dapat mengajukan lelang sebelum melakukan perubahan nama pemegang HT pada buku tanah dan SHT. Untuk KPKNL di wilayah Kanwil DJKN DKI Jakarta, hal tersebut sangat berdampak karena kewenangan tiap KPKNL untuk melaksanakan pelayanan lelang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Dirjen KN No. KEP-113/KN/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-50/KN/2025 tentang Pembagian Tugas pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Upaya yang telah dilakukan:

1. KPKNL telah berupaya melakukan koordinasi dengan pihak pemohon lelang seperti Tim Kurator dan pihak perbankan untuk segera mengajukan lelang ulang atas objek lelang yang berpotensi laku.
2. KPKNL telah berupaya menggali potensi lelang dari jenis lelang yang lain, seperti lelang sukarela dari Dana Pensiun Pertamina, Dana Pensiun Krakatau Steel, Tim Likuidasi Dana Pensiun LKBN-Antara.

Tindakan yang telah dilakukan oleh Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam upaya pencapaian IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah Penggalan potensi PNBPN Aset, Bea Lelang, dan Biad PN.

Adapun rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada tahun mendatang adalah:

1. Monitoring dan evaluasi capaian PNBPN Asset.
2. Penggalan potensi lelang.

3. Pembinaan kepada KPKNL lingkup Kanwil DJKN DKI Jakarta.
4. Pemeriksaan berkala.
5. Monitoring dan evaluasi capaian penerimaan Biad PN.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu dan Standar Nasional tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 3.10
Perbandingan target dan realisasi
IKU Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	100%	100%	100%	-	120%
2024	100%	100%	100%	100%	-	125.49%
2023	100%	100%	100%	100%	-	125.16%
2022	100%	100%	100%	100%	-	169.18%
2021	100%	100%	100%	100%	-	135.97%

Sesuai tabel di atas, dapat terlihat perbandingan antara target dan realisasi antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sesuai PMK 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 sesuai PMK 70 Tahun 2025, Rencana Strategis DJKN dan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Keuangan. Adapun target Standar Nasional tidak dapat dibandingkan.

2. Sasaran Strategis: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dilakukan dengan memastikan aset negara dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai aturan. Optimalisasi aset bertujuan untuk meningkatkan nilai dan manfaatnya dalam mendukung pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam pengelolaan piutang negara, upaya difokuskan pada penyelesaian yang tepat guna memperkuat keseimbangan fiskal dan pemulihan keuangan negara. Sementara itu, penyelenggaraan lelang dilakukan secara akuntabel dan efisien untuk meningkatkan realisasi pokok lelang dengan mendorong nilai transaksi yang optimal serta meningkatkan partisipasi publik terhadap pengelolaan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU sebagai berikut:

a. IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan.

Target IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%**, dengan realisasi **117.31%** atau capaian sebesar **117.31%** dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah:

Tabel 3.11
Trajectory IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

K-Two	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	Max
Realisasi	230.21%	120.99%	120.99%	120%	120%	117.31%	117.31%	
Capaian	230.20%	201.65%	201.65%	150%	150%	117.31%	117.31%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	117.31%	117.31%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara secara berkala. Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun mendatang diantaranya adalah:

1. Monitoring dan evaluasi optimalisasi pengelolaan aset negara.
2. *One on one meeting* dengan KPKNL lingkup Kanwil DJKN DKI Jakarta.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu dan Standar Nasional tahun 2024 sampai dengan 2025.

Tabel 3.12
Perbandingan target dan realisasi kinerja
IKU Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100	-	-	117.31%
2024	100%	-	-	-	-	118.56%
2023	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-

Sesuai tabel di atas, hanya terdapat perbandingan antara target dan realisasi Perjanjian Kinerja, sedangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sesuai PMK 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 sesuai PMK 70 Tahun 2025, Rencana Strategis DJKN dan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Keuangan serta Standar Nasional tidak dapat dibandingkan.

b. IKU Persentase realisasi pokok lelang

Target IKU Persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%** yaitu **Rp12,923,279,000,000.00** (dua belas triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan realisasi sebesar **106.13%** yaitu **Rp13,715,897,319,496.00** (tiga belas triliun tujuh ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan status hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah:

Tabel 3.13
Trajectory IKU Persentase realisasi pokok lelang

K-Two	2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	2b-CP Persentase realisasi pokok lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max
Realisasi	315.70%	135.90%	135.90%	118.01%	118.01%	106.13%	106.13%	
Capaian	315.70%	135.90%	135.90%	118.01%	118.01%	106.13%	106.13%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	118.01%	118.01%	106.13%	106.13%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Tabel 3.14
Realisasi pokok lelang masing-masing KPKNL

Realisasi Pokok Lelang			
Unit	Target Q4	Realisasi Desember	% Capaian thd Q4
KPKNL Jakarta I	Rp 620.000.000.000.00	Rp 611.393.910.868.00	98.61%
KPKNL Jakarta II	Rp 765.000.000.000.00	Rp 833.630.132.716.00	108.97%
KPKNL Jakarta III	Rp 894.000.000.000.00	Rp 904.666.839.808.00	101.19%
KPKNL Jakarta IV	Rp 652.000.000.000.00	Rp 606.458.313.721.00	93.02%
KPKNL Jakarta V	Rp 894.000.000.000.00	Rp 925.596.686.483.00	103.53%
Kanwil DKI Jakarta	Rp 9.098.279.000.000.00	Rp 9.828.628.292.700.00	108.03%
Total Target/Realisasi	Rp12,923,279,000,000.00	Rp13,710,374,176,296.00	106.09%

Berdasarkan rincian realisasi di atas, realisasi pokok lelang pada KPKNL Jakarta I dan KPKNL Jakarta IV belum tercapai (warna kuning), namun realisasi pokok lelang Kanwil DJKN DKI Jakarta secara keseluruhan telah tercapai sebesar **106.13%**. Penyebab dan upaya yang telah dilakukan KPKNL atas realisasi pokok lelang yang belum tercapai ini pada dasarnya sama dengan penyebab dan upaya yang dilakukan terkait PNBPN dari bea lelang.

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut adalah melaksanakan penggalan potensi lelang dan monitoring serta evaluasi capaian lelang secara berkala. Hal yang sama akan tetap dilaksanakan dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu dan Standar Nasional tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 3.15
Perbandingan target dan realisasi kinerja
IKU Persentase realisasi pokok lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	100%	-	106.09%
2024	100%	-	100%	100%	-	122.62%
2023	100%	-	100%	100%	-	134.41%
2022	100%	-	100%	100%	-	106.30%
2021	100%	-	100%	100%	-	113.24%

Sesuai tabel di atas, hanya terdapat perbandingan antara target dan realisasi Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN dan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Keuangan, sedangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sesuai PMK 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis

Kementerian Keuangan 2025-2029 sesuai PMK 70 Tahun 2025 serta Standar Nasional tidak dapat dibandingkan.

c. IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jls. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
4. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Target IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%** yaitu **Rp2,577,381,000,000.00** (dua triliun lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah), dengan realisasi sebesar **116.02%** yaitu **Rp3,854,595,175,480.63** (tiga triliun delapan ratus lima puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah enam puluh tiga sen) dengan status hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud sebagai berikut:

Tabel 3.16
Trajectory IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

K-Two	2.Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max
Realisasi	140.47%	152.91%	152.91%	197.82%	197.82%	116.02%	116.02%	
Capaian	140.47%	152.91%	152.91%	197.82%	197.82%	116.02%	116.02%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	116.02%	116.02%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut rincian realisasi penurunan saldo Piutang Negara masing-masing KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta:

Tabel 3.17
Realisasi Penurunan Saldo Piutang Negara masing-masing KPKNL

Realisasi Penurunan Saldo Piutang Negara				
Unit	Target Q4	Target Q4 adendum	Realisasi Desember	% Capaian thd Q4 adendum
KPKNL Jakarta I	Rp 348,381,000,000.00	Rp 400,873,985,343.00	Rp 409,938,402,165.74	102.26%
KPKNL Jakarta II	Rp 249,000,000,000.00	Rp 345,897,944,434.00	Rp 533,000,176,014.25	154.09%
KPKNL Jakarta III	Rp 100,000,000,000.00	Rp 100,000,000,000.00	Rp 100,492,130,080.73	100.49%
KPKNL Jakarta IV	Rp 200,000,000,000.00	Rp 200,000,000,000.00	Rp 226,446,927,397.00	113.22%
KPKNL Jakarta V	Rp 1,680,000,000,000.00	Rp 2,446,875,852,318.00	Rp 2,584,717,539,822.91	105.63%
Total	Rp 2,577,381,000,000.00	Rp 3,322,383,924,000.00	Rp 3,854,595,175,480.63	116.02%

Berdasarkan rincian realisasi di atas, pada periode Q4, IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara terdapat adendum target yakni pada target KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta II dan KPKNL Jakarta V. Target IKU setelah adendum adalah sebesar **Rp3,322,383,924,000.00** (tiga triliun tiga ratus dua puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut adalah:

1. Melaksanakan moneyv penurunan saldo piutang negara.
2. Melaksanakan Forum Group Discussion (FGD) Pengurusan Piutang Negara.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada masa mendatang adalah:

1. Monev Pencapaian realisasi penurunan nilai saldo Piutang Negara
2. *One on one meeting* dengan KPKNL
3. Penetapan Surat Paksa
4. Perbantuan Pemeriksaan Debitur,
5. Barang Jaminan dan HKL

3. Sasaran Strategis: Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

Pelayanan kekayaan negara dan lelang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa melalui layanan yang berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan. Kualitas layanan ditingkatkan dengan komunikasi yang efektif serta edukasi yang mendukung pemahaman dan partisipasi yang lebih baik. Selain itu, DJKN sebagai pengelola aset terus berupaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia tidak hanya di lingkungan internal, tetapi juga di kalangan pemangku kepentingan terkait, termasuk instansi pemerintah daerah yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kemampuan dibidang pengelolaan kekayaan negara.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU sebagai berikut:

a. IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

IKU ini di Kanwil terdiri dari 4 komponen antara lain:

1. Edukasi dan komunikasi PKN (dilaksanakan kanwil)
2. Edukasi dan komunikasi PN (dilaksanakan KPKNL)
3. Edukasi dan komunikasi Penilaian (dilaksanakan kanwil)
4. Edukasi dan komunikasi Lelang (dilaksanakan KPKNL)

Target IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **74**, dengan realisasi **105.88** atau capaiannya sebesar **143.07%** dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Trajectory IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

K-Two	3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	Max
Realisasi	101.50	100.68	100.68	102.47	102.47	105.88	105.88	
Capaian	137.16%	136.05%	136.05%	138.47%	138.47%	143.07%	143.07%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

b. IKU Tingkat kompetensi penilai pemerintah

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data. Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Target IKU Tingkat kompetensi penilai pemerintah pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **70**, dengan realisasi **96** atau capaiannya sebesar **137.14%** dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Trajectory IKU Tingkat kompetensi penilai pemerintah

K-Two	3. Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
	3b-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70	70	70	70	70	70	70	Max
Realisasi	96	88	88	94	96	96	96	
Capaian	137.14%	125.71%	125.71%	134.29%	137.14%	137.14%	137.14%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut adalah:

1. Melakukan verifikasi kompetensi JFPP

2. Melakukan kaji ulang laporan penilaian
3. Melakukan revidi laporan penilaian

Adapun rekomendasi rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang adalah melakukan revidi Laporan Penilaian Non DJKN.

4. Sasaran Strategis: Penerapan tata kelola aset yang efektif

Penerapan tata kelola aset yang efektif bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara, khususnya Barang Milik Negara (BMN), dikelola secara optimal, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tata kelola yang efektif juga mendukung kepastian hukum, keberlanjutan pemanfaatan serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU sebagai berikut:

a. IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Target IKU Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%** yaitu sebanyak **6.169** (enam ribu seratus enam puluh sembilan) NUP, dengan realisasi **119.18%** yaitu sebanyak **7.352** (tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua) NUP dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Trajectory IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

K-Two	4. Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	Max
Realisasi	9.17%	51.68%	51.68%	68.89%	68.89%	119.18%	119.18%	
Capaian	183.50%	129.2%	129.2%	114.82%	114.82%	119.18%	119.18%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	114.82%	114.82%	119.18%	119.18%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut rincian realisasi sertipikasi masing-masing KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta:

Tabel 3.21
Realisasi Sertipikasi masing-masing KPKNL



Unit	Target Q4 (NUP)	Realisasi Desember (NUP)	% Capaian thd Q4
KPKNL Jakarta I	2859	2907	101.68%
KPKNL Jakarta II	82	109	132.93%
KPKNL Jakarta III	126	159	126.19%
KPKNL Jakarta IV	31	38	122.58%
KPKNL Jakarta V	103	124	120.39%
Total Target/Realisasi	3201	3337	104.25%

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut pada tahun 2025 adalah monitoring dan evaluasi capaian penyelesaian sertipikasi secara berkala.

Adapun rekomendasi rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang adalah:

1. Monitoring dan evaluasi Penyelesaian Target Sertipikasi BMN Berupa Tanah.
2. Koordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kantor Pertanahan, KPKNL, dan Satuan Kerja.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu dan Standar Nasional tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 3.22
Perbandingan target dan realisasi
IKU Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	100%	-	119.18%
2024	100%	-	100%	100%	-	104.25%
2023	100%	-	100%	100%	-	114.89%
2022	1.404	-	100%	100%	-	1.633
2021	180	-	100%	-	-	156

Sesuai tabel di atas, dapat terlihat perbandingan antara target dan capaian realisasi antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis DJKN dan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Keuangan. Adapun Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sesuai PMK 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 sesuai PMK 70 Tahun 2025 serta Standar Nasional tidak dapat dibandingkan.

b. IKU Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Target IKU Persentase evaluasi kinerja BMN pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%** terdiri dari Evaluasi Kinerja BMN sebanyak **1.773** (seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) NUP dan Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti satker sebanyak **91** (sembilan puluh satu) NUP, dengan realisasi sebesar **115.53%** terdiri dari Evaluasi Kinerja BMN sebanyak **1.969** (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) NUP dan Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti satker sebanyak **1.504** (seribu lima ratus empat) NUP dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23
Trajectory IKU Persentase evaluasi kinerja BMN

K-Two	4. Penerapan tata kelola aset yang efektif							
	4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max
Realisasi	19.11%	56.90%	56.90%	106.85%	106.85%	115.53%	115.53%	
Capaian	127.4%	113.80%	113.80%	142.47%	142.47%	115.53%	115.53%	
Nilai Kinerja	120%	113.80%	113.80%	120%	120%	115.53%	115.53%	

Berikut realisasi evaluasi kinerja BMN masing-masing KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta:

Tabel 3.24
Rincian Realisasi Kinerja BMN masing-masing KPKNL

Realisasi Evaluasi Kinerja BMN							
No	Kanwil/KPKNL	Target 2025 (NUP)		Capaian s.d. Desember 2025			
		Evaluasi Kinerja BMN	Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti satker Paket	Evaluasi Kinerja BMN (NUP)	Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti satker (NUP)	Capaian Q4	% Capaian Tahunan
1	2	5	6	7	8	9	10
7	Total Kanwil DKI Jakarta	1773	91	1969	1504	115.53%	115.53%
1	KPKNL JAKARTA I	307	16	310	310	110.49%	110.49%
2	KPKNL JAKARTA II	365	19	438	338	120.00%	120.00%
3	KPKNL JAKARTA III	211	11	254	47	120.19%	120.19%
4	KPKNL JAKARTA IV	210	11	266	109	123.33%	123.33%
5	KPKNL JAKARTA V	680	34	701	700	111.54%	111.54%

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut pada tahun 2025 adalah monitoring dan evaluasi capaian portofolio asset secara berkala. Adapun rekomendasi rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang adalah Melakukan koordinasi dan monev dengan KPKNL Jakarta I sd V setiap bulan, laporan bulanan ke kantor pusat cq Dit PKKN.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu dan Standar Nasional tahun 2022 sampai dengan 2025.

Tabel 3.25
Perbandingan target dan realisasi kinerja
IKU Persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset)

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	-	-	115.53%
2024	100%	-	100%	-	-	132.08%
2023	100%	-	100%	-	-	125.11%
2022	100%	-	100%	-	-	113.69%
2021	-	-	100%	-	-	-

Sesuai tabel di atas, hanya terdapat target dan realisasi Perjanjian Kinerja, sedangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sesuai PMK 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 sesuai PMK 70 Tahun 2025 Rencana Strategis DJKN dan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Keuangan serta Standar Nasional tidak dapat dibandingkan.

5. Sasaran Strategis: Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang dilaksanakan secara profesional dan produktif untuk mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Penyelesaian piutang negara diarahkan pada percepatan proses yang adil, transparan, dan efektif guna mengoptimalkan pemulihan keuangan negara. Layanan penilaian dikembangkan dengan memastikan akurasi, keandalan, dan ketepatan waktu dalam menentukan nilai aset, sehingga mendukung pemanfaatan aset yang optimal dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sementara itu, layanan lelang diperkuat untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pelaksanaan lelang, dengan mendorong peningkatan jumlah lelang laku yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi serta manfaat yang lebih luas bagi pemangku kepentingan.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU sebagai berikut:

a. IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jis. PP No. 28 Tahun 2022 jis. PMK 240/PMK.06/2016 jis. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan K/L/Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)

Target IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%** yaitu sebanyak **1.820** (seribu delapan ratus dua puluh) BKPN, dengan realisasi **160.21%** yaitu sebanyak **2.628** (dua ribu enam

ratus dua puluh delapan) dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.26
Trajectory IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

K-Two	5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Max
Realisasi	142.68%	130.64%	130.64%	125.72%	125.72%	160.21%	160.21%	
Capaian	142.68%	130.64%	130.64%	125.72%	125.72%	160.21%	160.21%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut rincian realisasi BKPN masing-masing KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta:

Tabel 3.27
Rincian Realisasi Saldo BKPN masing-masing KPKNL

Realisasi Saldo Berkas Kasus Piutang Negara									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Unit	Saldo Awal	Target Q4		Target Q4 adendum	Realisasi Desember					% Capaian thd Q4 adendum	Total Bobot
		Saldo BKPN	Penyelesaian BKPN		Saldo BKPN	Penyelesaian BKPN	Komponen 1 (1,2)	Komponen 2 (1,1)	Komponen 3 (1)		
KPKNL Jakarta I	700	660	40	40	637	48	14	34	0	135.50%	54.20
KPKNL Jakarta II	2,213	1,963	250	283	1,721	321	110	211	0	145.64%	364.10
KPKNL Jakarta III	2,639	2,239	400	400	1,920	839	31	801	7	231.33%	925.30
KPKNL Jakarta IV	2,464	2,064	400	400	1,725	509	35	474	0	140.85%	563.40
KPKNL Jakarta V	5,420	4,690	730	730	4,248	911	67	844	0	138.19%	1008.80
Total	13,436	11,616	1,820	1,820	10,251	2,628	257.0	2,364.00	7	160.21%	2915.80

Sesuai tabel di atas, pada periode Q4, realisasi IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara pada KPKNL Jakarta II telah melampaui target sehingga dilakukan adendum, namun adendum ini tidak mempengaruhi raw data IKU Kanwil DJKN DKI Jakarta sehingga tidak dilakukan adendum pada IKU Penyelesaian BKPN Kanwil DJKN DKI Jakarta.

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut pada tahun 2025 adalah monitoring dan evaluasi capaian penyelesaian berkas kasus piutang negara. Adapun rekomendasi rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang adalah:

1. Monev Pencapaian realisasi penyelesaian Piutang Negara
2. *One on one meeting* dengan KPKNL
3. Penetapan Surat Paksa
4. Bantuan Pemeriksaan Debitur, Barang Jaminan dan HKL

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu dan Standar Nasional tahun 2022 sampai dengan 2025.

Tabel 3.28
Perbandingan target dan realisasi
IKU Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	100%	-	-	160.21%
2024	-	-	100%	-	-	-
2023	100%	-	100%	100%	-	131.18%
2022	100%	-	100%	-	-	125.10%
2021	100%	-	100%			94.71%

Sesuai tabel di atas, dapat dilihat perbandingan target dan realisasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN, sedangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sesuai PMK 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 sesuai PMK 70 Tahun 2025, Rencana Kerja Tahunan Kementerian Keuangan dan Standar Nasional tidak dapat dibandingkan.

b. IKU Tingkat kualitas layanan penilaian

Sebagaimana RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yaitu Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, transformasi tata Kelola diarahkan untuk mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif, salah satunya untuk mewujudkan pelayanan strategis berkualitas, arah kebijakan difokuskan pada transformasi proses bisnis. Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital juga didorong melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi dan penerapan satu data. Pelayanan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional diukur melalui Layanan Penilaian

yang Tepat Waktu, Basis Data yang Akurat dan Hasil Penilaian yang mencerminkan kondisi optimal.

Target IKU Tingkat kualitas layanan penilaian pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **70%**, dengan realisasi **114.22%** yang terdiri dari 2 komponen yaitu Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian dan Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang atau capaian sebesar **163.18%**. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29
Trajectory IKU Tingkat kualitas layanan penilaian

K-Two	5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	Max
Realisasi	109.41%	111.47%	111.47%	118.55%	118.55%	114.22%	114.22%	
Capaian	156.41%	159.24%	159.24%	169.36%	169.36%	163.18%	163.18%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Berikut tabel realisasi tingkat kualitas layanan penilaian masing-masing KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta:

Tabel 3.30
Rincian Realisasi Tingkat Kualitas Layanan masing-masing KPKNL

Realisasi Tingkat Kualitas Layanan Penilaian						
Unit	Target Q4	Target Q4	Realisasi Desember			Capaian thd Q4
			Komponen Norma Waktu Layanan Penilaian	Komponen Nilai Hasil Kaji Ulang	Total Nilai	
KPKNL Jakarta I	80%	80%	99.67%	125%	131.00%	163.75%
KPKNL Jakarta II	80%	80%	100.73%	125%	107.79%	134.74%
KPKNL Jakarta III	80%	80%	91.27%	125%	113.88%	142.35%
KPKNL Jakarta IV	80%	80%	100.85%	125%	107.84%	134.80%
KPKNL Jakarta V	80%	80%	90.45%	125%	106.81%	133.52%
Kanwil	80%	80%	95.00%	125%	105.50%	131.88%
Total	80%	80%	96.33%	125%	114.22%	142.78%

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut pada tahun 2025 adalah:

1. Melaksanakan penilaian sesuai dengan SOP
2. Melaksanakan kaji ulang laporan penilaian

Adapun rekomendasi rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang adalah:

1. Melaksanakan tahap kegiatan penilaian laporan sesuai dengan norma waktu
2. Pembinaan kepada seluruh JFPP setiap triwulan

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu dan Standar Nasional tahun 2022 sampai dengan 2025

Tabel 3.31
Perbandingan target dan realisasi
IKU IKU Tingkat kualitas layanan penilaian

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	70%	-	-	160.21%
2024	-	-	-	-	-	-
2023	100%	-	-	100%	-	131.18%
2022	100%	-	-	-	-	125.10%
2021	100%	-	-	-	-	94.71%

Sesuai tabel di atas, dapat dilihat perbandingan target dan realisasi Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis DJKN, sedangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sesuai PMK 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 sesuai PMK 70 Tahun 2025, Rencana Kerja Tahunan Kementerian Keuangan dan Standar Nasional tidak dapat dibandingkan.

c. IKU Persentase produktivitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNBP lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Target IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **80%**, dengan realisasi **123.86%** atau dengan capaian sebesar **154.83%** dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.32
Trajectory IKU Persentase produktivitas lelang

K-Two	5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5c-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	40%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	Max
Realisasi	57.30%	77.69%	77.69%	99.33%	99.33%	123.86%	123.86%	
Capaian	143.25%	194.23%	194.23%	141.9%	141.9%	154.83%	154.83%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut pada tahun 2025 adalah Optimalisasi frekuensi pelaksanaan lelang dan lot lelang laku. Adapun rekomendasi rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang adalah:

1. Penggalan potensi lelang
2. Pembinaan kepada KPKNL (termasuk *one on one meeting*), PL II, dan Balai Lelang
3. Pemeriksaan berkala

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu dan Standar Nasional tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 3.33
Perbandingan target dan realisasi
IKU Persentase produktivitas lelang

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	80%	32%	80%	-	-	154.83%
2024	89%	32%	34%	-	-	108.54%
2023	80%	32%	34%	36%	-	109.77%
2022	36%	32%	34%	-	-	60.16%
2021	35%	32%	34%	-	-	58.48%

Sesuai tabel di atas, dapat terlihat perbandingan antara target dan capaian realisasi antara Perjanjian Kinerja, Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sesuai PMK 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 sesuai PMK 70 Tahun 2025 serta Rencana Strategis

DJKN dan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Keuangan. Adapun Standar Nasional tidak dapat dibandingkan.

6. Sasaran Strategis: Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi memerlukan dukungan sumber daya yang adaptif, termasuk organisasi yang kondusif dan SDM yang kompeten. SDM yang berkompentensi tinggi menjadi aset penting dalam mencapai tujuan organisasi, sementara proses bisnis yang efisien mendukung efektivitas kerja. Pengelolaan keuangan yang akuntabel memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara optimal, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dengan prinsip efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas pemanfaatannya guna mendukung operasional organisasi. Pengelolaan yang baik tercermin dari tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi, sehingga seluruh sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengidentifikasi 3 (tiga) IKU sebagai berikut:

a. IKU Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan pada PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024 Pasal 249 ayat (7). Nilai kinerja anggaran Kementerian/Lembaga merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Target IKU Indeks kualitas kinerja anggaran pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **100**, dengan realisasi **120 atau** capaian sebesar **120%** dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.34
Trajectory IKU Indeks kualitas kinerja anggaran

K-Two	6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut pada tahun 2025 adalah monitoring dan evaluasi rencana penarikan dana (RPD) dan realisasi output. Adapun rekomendasi rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang adalah:

1. Monitoring pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan
2. Monitoring capaian output

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu dan Standar Nasional tahun 2022 sampai dengan 2025.

Tabel 3.35
Perbandingan target dan realisasi
IKU Indeks kualitas kinerja anggaran

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100	95	95	95	-	120.00
2024	100	95	95	95	-	120.00
2023	100	95	95	95	-	97.99
2022	95.5	95	95	95	-	91.54%
2021	-	-	95	-	-	-

Sesuai tabel di atas, dapat terlihat perbandingan antara target dan capaian realisasi Perjanjian Kinerja, adapun Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sesuai PMK 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 sesuai PMK 70 Tahun 2025, Rencana Strategis DJKN dan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Keuangan dan Standar Nasional tidak dapat dibandingkan.

b. IKU Indeks Tata Kelola pengadaan barang dan jasa

IKU ini mengukur komponen berikut:

1. Kualitas Pengelolaan Pengadaan (diukur dari Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri); dan
2. Indeks Tata Kelola Pengadaan yang meliputi SIRUP, *E-Tendering*, *E-Purchasing Katalog*, *Non E-Tendering* dan *Non E-Purchasing*, dan E-Kontrak.

Target IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **100**, dengan realisasi **125.2** atau capaian sebesar **125.2%** dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud sebagai berikut:

Tabel 3.36
Trajectory IKU Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa

K-Two	6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	160	145.7	145.7	135	135	125.2	125.2	
Capaian	160%	145.7%	145.7%	135%	135%	125.2%	125.2%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut pada tahun 2025 adalah monitoring pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Adapun rekomendasi rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

c. IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKU ini mengukur 2 komponen:

1. Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator
2. Pemenuhan jam pelatihan dan Pemanggilan Pelartihan

Target IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **80%**, dengan realisasi **100%** atau capaian sebesar **125%** dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud sebagai berikut:

Tabel 3.37
Trajectory IKUPersentase pengembangan kompetensi pegawai

K-Two	6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	Max
Realisasi	33.11%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	165.55%	250%	250%	166.66%	166.66%	125%	125%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut pada tahun 2025 adalah monitoring pemenuhan jamlat dan kehadiran pemanggilan diklat pegawai. Adapun rekomendasi rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang adalah monitoring pengembangan kompetensi pegawai.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu dan Standar Nasional tahun 2021 sampai dengan 2025.

Tabel 3.38
Perbandingan target dan realisasi
IKU Persentase pengembangan kompetensi pegawai

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	100%	-	-	-	-	120%
2024	100%	-	-	-	-	120%
2023	100%	-	-	-	-	120%
2022	100%	-	-	-	-	120%
2021	100%	-	-	-	-	120%

Sesuai tabel di atas, dapat terlihat perbandingan antara target dan capaian realisasi Perjanjian Kinerja. Adapun Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sesuai PMK 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 sesuai PMK 70 Tahun 2025, Rencana Strategis DJKN dan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Keuangan dan Standar Nasional tidak dapat dibandingkan.

7. Sasaran Strategis: Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Penanganan hukum difokuskan pada penyelesaian permasalahan hukum secara optimal guna

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi unit organisasi serta aparatur di dalamnya. Sementara itu, komunikasi publik dilakukan secara strategis untuk memastikan penyampaian kebijakan, tujuan, dan program pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat secara tepat sasaran. Komunikasi publik yang dilakukan agar dapat memberi dampak positif dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan strategi komunikasi kolaboratif yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait.

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU sebagai berikut:

a. IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

IKU ini meliputi strategi komunikasi dan amplifikasi *employee advocacy*.

Target IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **3.55**, dengan realisasi **5.44** atau capaian sebesar **153.23%** dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.39
Trajectory IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

K-Two	7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	Max
Realisasi	5.23	5.23	5.23	5.15	5.73	5.44	5.44	
Capaian	147.37%	147.37%	147.37%	145.07%	161.40%	153.16%	153.16%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut pada tahun 2025 adalah Melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan KPKNL Jakarta I s.d. V. Adapun rekomendasi rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang adalah melaksanakan koordinasi dgn KPKNL Jakarta I sd V dan melakukan evaluasi atas efektivitas kegiatan komunikasi Triwulan I.

Berikut tabel perbandingan target dan realisasi kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja, Renstra Kementerian Keuangan, Renstra DJKN, Renja Kemenkeu dan Standar Nasional tahun 2022 sampai dengan 2025.

Tabel 3.40
Perbandingan target dan realisasi
IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Tahun	Target					Realisasi
	Perjanjian Kinerja	Renstra Kemenkeu	Renstra DJKN	Renja Kemenkeu	Standar Nasional	
2025	3.55	-	-	-	-	5.44
2024	3.55	-	-	3.55	-	5.02
2023	100	-	-	3.55	-	110
2022	3.55	-	-	3.5	-	3.77

Sesuai tabel di atas, dapat terlihat perbandingan antara target dan capaian realisasi Perjanjian Kinerja dengan Rencana Kerja Tahunan Kementerian Keuangan. Adapun Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sesuai PMK 77/PMK.01/2020 dan Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025-2029 sesuai PMK 70 Tahun 2025, Rencana Strategis DJKN dan Standar Nasional tidak dapat dibandingkan.

b. IKU Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

1. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (bobot 80%),
2. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (bobot 20%).

Target IKU Indeks penanganan permasalahan hukum pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **100**, dengan realisasi **113.28** atau capaian sebesar **113.28%** dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.41
Trajectory IKU Indeks penanganan permasalahan hukum

K-Two	7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	111.11	113.79	113.79	110.81	110.81	113.28	113.28	
Capaian	111.11%	113.79%	113.79%	110.81%	110.81%	113.28%	113.28%	
Nilai Kinerja	111.11%	113.79%	113.79%	110.81%	110.81%	113.28%	113.28%	

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut pada tahun 2025 adalah:

1. Pelaksanaan tugas terkait penanganan permasalahan hukum sesuai dengan SOP.
2. Pelaksanaan koordinasi/bimbingan teknis dengan KPKNL Jakarta I s.d. V.

Adapun rekomendasi rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang adalah meningkatkan kehadiran dalam persidangan, penyiapan jawaban, duplik dengan memperhatikan teknik beracara dan tetap berkoordinasi dengan KPKNL, Direktorat Hukum dan Humas DJKN serta Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

8. Sasaran Strategis: Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Dalam rangka *quality assurance* atas pengelolaan organisasi, Kementerian Keuangan menerapkan pengawasan dan pengendalian internal serta penerapan manajemen risiko. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengidentifikasi 2 (dua) IKU sebagai berikut:

a. IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

IKU ini terdiri atas 3 komponen yakni:

1. Penilaian kinerja organisasi (30%)
2. Penilaian kinerja pegawai (30%)
3. Penilaian manajemen risiko (40%)

Target IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **80**, dengan realisasi **91.82** atau capaian sebesar **114.78%** dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud sebagai berikut:

Tabel 3.42
Trajectory IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

K-Two	8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max
Realisasi	96.4	86.61	86.61	90.02	90.02	91.82	91.82	
Capaian	120.5%	108.27%	108.27%	112.52%	112.52%	115%	115%	
Nilai Kinerja	120.5%	108.27%	108.27%	112.52%	112.52%	115%	115%	

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut pada tahun 2025 adalah:

1. Pelaksanaan tugas terkait penanganan permasalahan hukum sesuai dengan SOP.
2. Pelaksanaan koordinasi/bimbingan teknis dengan KPKNL Jakarta I s.d. V. Adapun rekomendasi rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang adalah meningkatkan kehadiran dalam persidangan, penyiapan jawaban, replik, duplik dengan memperhatikan teknik beracara dan tetap berkoordinasi dengan KPKNL, Direktorat Hukum dan Humas DJKN dan Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

b. IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.

3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Target IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **100**, dengan realisasi sebesar **119.63** atau capaian sebesar **119.63%** dengan status IKU hijau. Adapun *trajectory* IKU dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 3.43

Trajectory IKU Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM

K-Two	8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm. 2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	Max
Realisasi	95	100	100	100	100	119.63	119.63	
Capaian	95%	100%	100%	100%	100%	119.63%	119.63%	
Nilai Kinerja	95%	100%	100%	100%	100%	119.63%	119.63%	

Tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk mencapai target IKU tersebut pada tahun 2025 adalah melakukan inventarisasi dan pemenuhan dokumen yang diminta. Dokumen dimaksud telah diunggah pada Aplikasi DIA pada 31 Juli 2025. Adapun rekomendasi rencana aksi dalam upaya pencapaian IKU pada masa mendatang adalah monitoring dan pemenuhan dokumen/kegiatan yang diperlukan.

B. Kinerja Lainnya

1. ALCo (Asset & Liabilities Committee) Regional DKI Jakarta

Kolaborasi dan sinergi antar Kantor Wilayah sebagai kepanjangan tangan Menteri Keuangan sangat diperlukan dalam rangka mendukung peran sebagai *Regional Chief Economist* (RCE), meningkatkan kualitas *Cash Planning Information Network* (CPIN), membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memitigasi risiko pelaksanaan APBN dan APBD, serta mendukung pelaksanaan kebijakan maupun perancangan kebijakan pelaksanaan anggaran yang lebih kontekstual. Oleh karena itu, dibentuklah ALCo (*Asset & Liabilities Committee*) Regional yang merupakan struktur di tingkat provinsi yang memiliki hubungan kerja serta memiliki peran untuk mendukung ALCo ditingkat Pusat melalui penyajian data dan informasi yang bersifat lokal atau regional.

Forum ALCo Regional Provinsi DKI Jakarta terdiri dari perwakilan Kemenkeu satu dari DJPB, DJP, DJBC dan DJKN melakukan 4 (empat) kali kegiatan setiap bulan sebagai berikut:

- Rapat koordinasi pokja teknis penyiapan data dan konsep analisis Alco (Peserta Pejabat Pengawas dan staf).
- Rapat koordinasi ALCo Regional tingkat Deputies (Pejabat Administrator).
- Rapat koordinasi ALCo Regional tingkat Komite (Pejabat Eselon II).
- Konferensi Pers ALCo Regional Provinsi DKI Jakarta.

Pada Rabu, 17 Desember 2025, Forum ALCo melaksanakan rapat tingkat komite (Eselon II) di Pendopo Parapatan 10 Kanwil DJKN DKI Jakarta dihadiri oleh seluruh pimpinan/perwakilan unit Eselon II Kementerian Keuangan di lingkup Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Forum membahas kondisi ekonomi terkini, perkembangan APBN meliputi kinerja pendapatan pajak, bea cukai dan PNBP, memetakan isu strategis terkait pendapatan dan belanja. Forum juga membahas perkembangan APBD.

Forum ALCo Regional DKI Jakarta merupakan wujud nyata dukungan seluruh perwakilan Kementerian Keuangan Satu dalam penguatan peran *regional Chief Economist*.

2. Melaksanakan Edukasi dan Lelang Disabilitas

1) Pelaksanaan Edukasi Lelang Sukarela melalui Lelang lukisan Penyandang Disabilitas Tuli yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II wilayah jabatan Jakarta

Acara Talkshow “Berbincang Isu Inklusi itu Asyik” dan Konser Amal Angklung dan Lelang Lukisan Penyandang Disabilitas Tuli “Goresan Warna, Getaran Jiwa”, dilaksanakan pada 9 Maret 2025 bertempat di Taman Ismail Marzuki. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama antara Biro Organta Sekjen Kemenkeu, Kanwil DJKN DKI Jakarta, Baznas Basis DKI Jakarta dan Komunitas Peduli Inklusi Kemenkeu.

2) Kegiatan PUG: “Ceria Berintegritas, Pendidikan Inklusi Untuk Anak Negeri” yaitu kegiatan Pengenalan tuisi Kemenkeu kepada masyarakat marginal dan diakhiri dengan simulasi lelang yang diikuti anak-anak jalanan, dilaksanakan pada 15 Juni 2025 bertempat di Aula Pendopo Parapatan Kanwil DJKN DKI Jakarta. Kegiatan ini atas kerja sama antara Kanwil DJKN DKI Jakarta, Sekolah Cinta Anak Indonesia dan Komunitas Peduli Inklusi Kemenkeu.

3) **Pelaksanaan Lelang Sukarela Wastra Nusantara Serentak oleh PL II Dalam Rangka Rekor MURI**

Kegiatan Lelang Sukarela Wastra Nusantara Serentak oleh PL II dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Juni 2025 bertempat di Aula Pendopo Parapatan 10 Kanwil DJKN DKI Jakarta. Lelang melibatkan 72 PL II dan dilaksanakan atas kolaborasi Perkumpulan Pejabat Lelang Kelas II Indonesia (PPL2I), Direktorat Lelang DJKN, Kanwil DJKN DKI Jakarta. Lelang dilaksanakan secara *hybrid*, yaitu penawaran lisan langsung di pendopo, dan secara tertulis melalui kolom *chat Zoom*. Seluruh PL II yang mengikuti Lelang tersebut berasal dari wilayah jabatan 17 Kanwil DJKN yang tersebar seluruh Indonesia. Adapun PL II yang mengikuti kegiatan dimaksud dari wilayah jabatan DKI Jakarta adalah sebanyak 13 orang. Penyerahan piagam penghargaan MURI dilakukan oleh Wakil Direktur Utama MURI, Osmar Semesta Susilo, MIB dan Senior Customer Relations Manager MURI, Andre Purwandono, S.S.

4). **Soft Launching Rumah Lelang Indonesia Parapatan 10**

Soft Launching Rumah Lelang Indonesia dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2025. Inisiatif pendirian Rumah Lelang Indonesia lahir dari semangat untuk menghadirkan sebuah ikon lelang nasional yang mampu menarik minat masyarakat luas, serta menjadi sarana edukatif dan normatif tentang dunia Pelelang Indonesia. Rumah Lelang Indonesia terletak di sisi kiri depan Pendopo Parapatan 10, memiliki luas sekitar 30 M2, dengan kapasitas untuk 10 s.d. 15 orang. Lokasinya sangat strategis dan mudah diakses oleh para pengunjung.

C. Realisasi Anggaran

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp11.061.350.000 (sebelas miliar enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan blokir sebesar Rp1.904.597.000 (satu miliar sembilan ratus empat juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), sehingga anggaran yang tersedia dan dapat digunakan yakni sebesar Rp9.156.753.000 (sembilan miliar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Adapun selama Tahun Anggaran 2025, Kanwil DJKN DKI Jakarta telah merealisasikan belanja sebesar Rp8.626.193.444 (94,21%), yang terdiri dari belanja barang sebesar Rp7.948.197.102 (95,79%) dan belanja modal sebesar Rp677.996.342 (78,94%). Atas realisasi tersebut, anggaran Kanwil DJKN DKI Jakarta masih memiliki saldo sebesar Rp530.559.556.

Tabel 3.44
Rincian realisasi DIPA

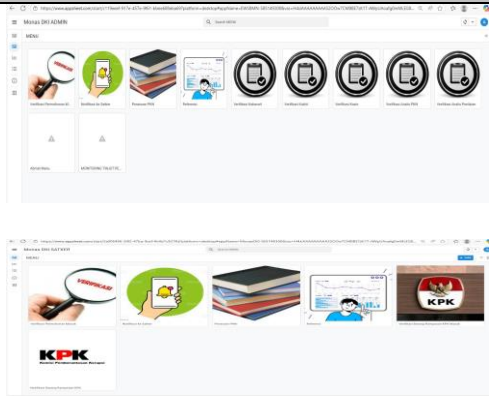
Bagian/Bidang	Pagu Tersedia (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	9.156.753.000	7.948.197.102	94,21
Bagian Umum	7.274.118.000	7.035.853.170	96,72
Bidang PKN	627.325.000	569.562.781	90,79
Bidang Penilaian	156.878.000	126.437.716	80,60
Bidang Piutang Negara	94.882.000	78.263.735	82,49
Bidang Lelang	67.206.000	66.170.000	98,46
Bidang KIHl	77.426.000	71.909.700	92,88
Belanja Modal	858.918.000	677.996.342	78,94
Bagian Umum	858.918.000	677.996.342	78,94

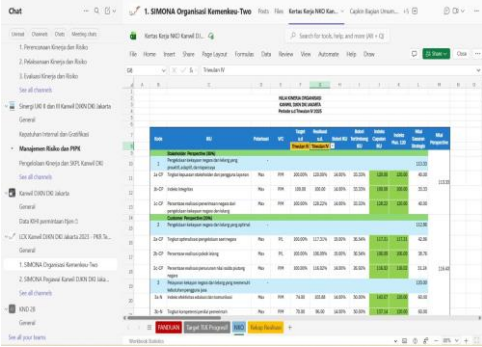
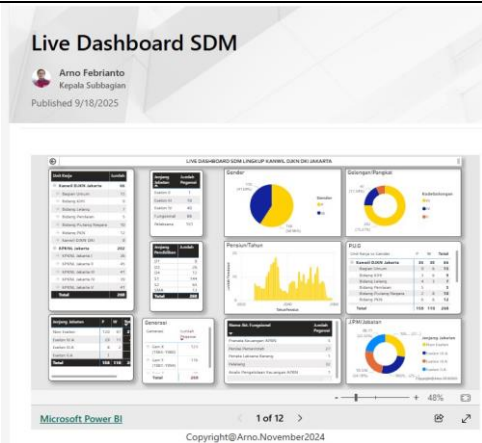
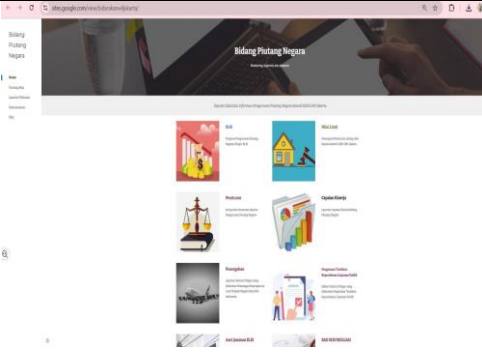
Akhir TA. 2025, terdapat kebijakan relaksasi pada perhitungan capaian IKU IKPA, yakni pada komponen penyerapan anggaran, yang semula belanja barang dan belanja modal minimum penyerapan masing-masing sebesar 90%, direlaksasi menjadi 80% untuk belanja barang dan 70% untuk belanja modal. Oleh karena itu, capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran TA 2025 Kanwil DJKN DKI Jakarta sebesar:

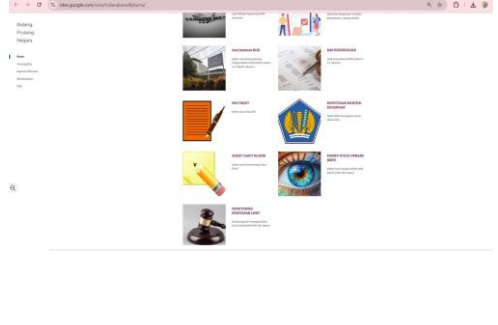
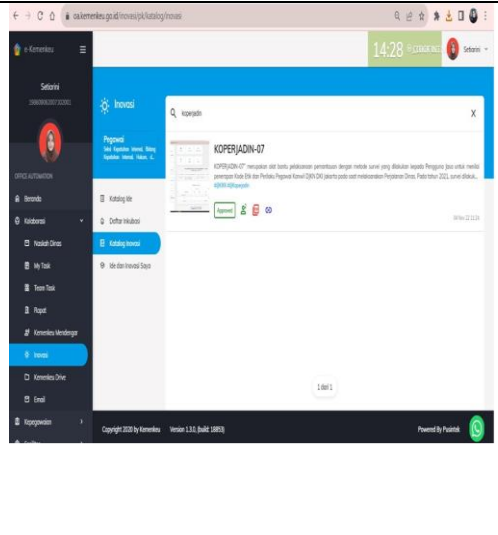
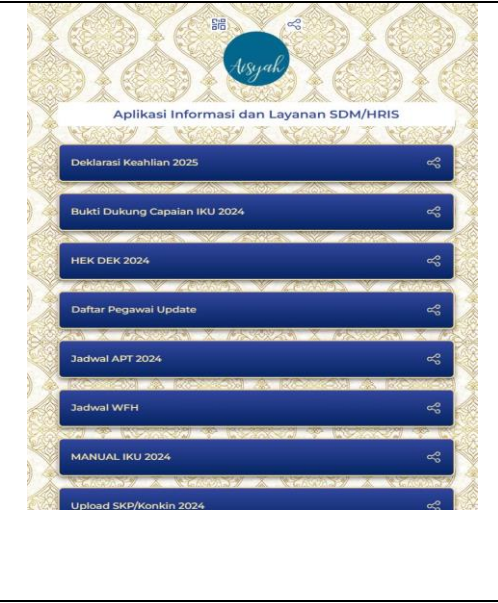
Tabel 3.45
Indeks Capaian IKU IKA 2025

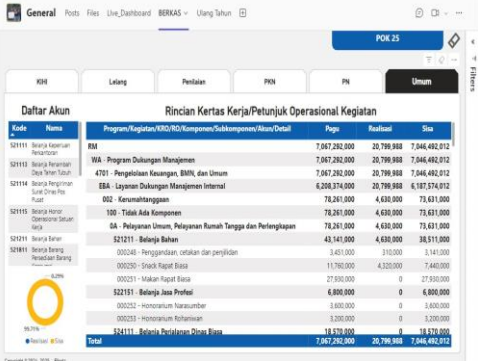
Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran			Capaian s.d Triwulan IV
A. Nilai IKPA			100
1	Revisi DIPA		100
2	Deviasi Hal III DIPA		100
3	Belanja Kontraktual		100
4	Pengelolaan UP dan TUP		100
5	Dispensasi SPM		100
6	Penyerapan Anggaran		100
7	Penyelesaian Tagihan		100
8	Capaian Output		100
B. Nilai SMART			100
Nilai Capaian IKU IKA s.d Triwulan IV			100
Indeks Capaian IKU IKA 2025			120

D. Inovasi

No	Narasi	Keterangan
1.	MONAS DKI v1 Untuk pelayanan pengelolaan Barang Milik Negara telah diakomodir oleh Implementasi SIMAN v2 pada akhir tahun 2024. Tahun 2025, MONAS DKI dikembangkan menjadi MONAS DKI v2 dengan ditambahkan fitur pelayanan pengelolaan kekayaan negara yang belum terakomodir dalam SIMAN v2, salah satunya untuk memberikan pelayanan permohonan PSP dan Hibah Barang Rampasan Negara dari KPK.	

2. SIMONA (Sistem Informasi Monitoring Kinerja)	
3. Pantau ST (Pantau Surat Tugas) memanfaatkan aplikasi Power BI pada Microsoft 365, Aplikasi Pantau ST menyajikan data rekap surat tugas secara lengkap.	
4. Dashboard SDM Live Dashboard Sumber Daya Manusia (SDM) Lingkup Kanwil DJKN DKI Jakarta dibentuk pada awal tahun 2025 memanfaatkan aplikasi Power BI pada Microsoft 365, Arno Febrianto-Kasubag SDM membuat Aplikasi Data SDM lingkup Kanwil DJKN DKI Jakarta. Dalam aplikasi ini telah dilakukan penambahan modul statistika terkait PUG, Homebase dan Kebintalan.	
5. SI PN KITA (Sistem Informasi Piutang Negara Kita) Adalah inovasi digital Bidang Piutang Negara Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai pusat data pengurusan Piutang Negara dalam satu platform terintegrasi. SiPNKita menghimpun informasi strategis seperti progres BLBI, nilai limit lelang, aset jaminan, pencegahan debitur, dan capaian kinerja untuk mendukung pegawai dalam melakukan monitoring, pengendalian dan pengambilan keputusan berbasis data secara lebih cepat,	

	
6. KOPERJADIN-07 (Kode Etik dan Perilaku Pegawai pada saat Melakukan Perjalanan Dinas). Aplikasi KOPERJADIN 07 digunakan untuk melaksanakan pemantauan terhadap pegawai yang menjalankan dinas tanpa harus datang ke lokasi dinas. Pegawai pada pelaksana KI cukup mengirimkan alamat KOPERJADIN dan unit tujuan bisa langsung memberikan <i>feedback</i> terhadap pegawai yg dinas.	
7. Aplikasi AISYAH (Aplikasi Informasi dan Layanan SDM/HRIS) Banyaknya aplikasi di Kementerian Keuangan/DJKN terkait Kepegawaian seperti DIANAS, SIMPEG, HRIS, Aplikasi Diklat dan Alike maka untuk mempercepat dan mempermudah pegawai dalam mendapatkan informasi, diluncurkan Aplikasi AISYAH alamat https://heylink.me/AISYAHDJKNDKI/ yaitu aplikasi internal Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk keperluan informasi kepegawaian (informasi satu pintu).	

8.	Beranda Keuangan Satker 3.0 (BERKAS) Memanfaatkan kelebihan aplikasi Power BI pada Microsoft 365, Efretz Lorens, Jafung Pranata Keuangan APBN Mahir, membuat alat monitoring realisasi anggaran BERKAS dengan menggunakan data dari format Excell cetakan aplikasi SAKTI yang ditautkan dengan sharepoint dan divisualisasikan dengan Power BI. Manfaat BERKAS antara lain meminimalisir potensi kesalahan input atas penyajian data yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui link google drive.	
----	--	--

E. Penghargaan dan Achievement

No	Narasi	Keterangan																																																																																				
1.	Penghargaan Keberlanjutan Predikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) Tahun 2025 Sesuai nota dinas Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-573/IJ.5/2025 tanggal 23 Desember 2025 hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI menuju WBK serta Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan ZI menuju WBK dan ZI menuju WBBM pada Unit Kerja di Lingkungan DJKN Tahun 2025.	Lampiran I Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor : ND-6436/KM.1/2025 Tanggal : 29 Desember 2025 HASIL PLENO PENETAPAN KEBERLANJUTAN PREDIKAT ZI-WBK/WBBM UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DJKN TAHUN 2025 <table><tr><th>No</th><th>Unit Kerja</th><th>Predikat</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>1</td><td>Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara</td><td>ZI-WBK</td><td>92,61</td></tr><tr><td>2</td><td>Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara</td><td>ZI-WBK</td><td>91,91</td></tr><tr><td>3</td><td>Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi</td><td>ZI-WBK</td><td>94,38</td></tr><tr><td>4</td><td>Kanwil DJKN Jawa Barat</td><td>ZI-WBK</td><td>89,99</td></tr><tr><td>5</td><td>KPKNL Bengkulu</td><td>ZI-WBK</td><td>96,55</td></tr><tr><td>6</td><td>KPKNL Bogor</td><td>ZI-WBK</td><td>90,53</td></tr><tr><td>7</td><td>KPKNL Jakarta I</td><td>ZI-WBK</td><td>90,08</td></tr><tr><td>8</td><td>KPKNL Jakarta III</td><td>ZI-WBK</td><td>93,96</td></tr><tr><td>9</td><td>KPKNL Jakarta IV</td><td>ZI-WBK</td><td>91,48</td></tr><tr><td>10</td><td>KPKNL Jayapura</td><td>ZI-WBK</td><td>92,94</td></tr><tr><td>11</td><td>KPKNL Kupang</td><td>ZI-WBK</td><td>85,87</td></tr><tr><td>12</td><td>KPKNL Padangsidimpuan</td><td>ZI-WBK</td><td>88,76</td></tr><tr><td>13</td><td>KPKNL Palembang</td><td>ZI-WBK</td><td>92,04</td></tr><tr><td>14</td><td>KPKNL Serang</td><td>ZI-WBK</td><td>93,43</td></tr><tr><td>15</td><td>KPKNL Singkawang</td><td>ZI-WBK</td><td>89,95</td></tr><tr><td>16</td><td>KPKNL Surakarta</td><td>ZI-WBK</td><td>93,44</td></tr><tr><td>17</td><td>KPKNL Yogyakarta</td><td>ZI-WBBM</td><td>93,43</td></tr><tr><td>18</td><td>Kanwil DJKN Banten</td><td>ZI-WBBM</td><td>92,79</td></tr><tr><td>19</td><td>Kanwil DJKN DKI Jakarta</td><td>ZI-WBBM</td><td>93,03</td></tr><tr><td>20</td><td>Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau</td><td>ZI-WBBM</td><td>92,87</td></tr></table> Pih. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,  Diinformasikan secara elektronik Acep Irawan	No	Unit Kerja	Predikat	Nilai	1	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	ZI-WBK	92,61	2	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara	ZI-WBK	91,91	3	Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi	ZI-WBK	94,38	4	Kanwil DJKN Jawa Barat	ZI-WBK	89,99	5	KPKNL Bengkulu	ZI-WBK	96,55	6	KPKNL Bogor	ZI-WBK	90,53	7	KPKNL Jakarta I	ZI-WBK	90,08	8	KPKNL Jakarta III	ZI-WBK	93,96	9	KPKNL Jakarta IV	ZI-WBK	91,48	10	KPKNL Jayapura	ZI-WBK	92,94	11	KPKNL Kupang	ZI-WBK	85,87	12	KPKNL Padangsidimpuan	ZI-WBK	88,76	13	KPKNL Palembang	ZI-WBK	92,04	14	KPKNL Serang	ZI-WBK	93,43	15	KPKNL Singkawang	ZI-WBK	89,95	16	KPKNL Surakarta	ZI-WBK	93,44	17	KPKNL Yogyakarta	ZI-WBBM	93,43	18	Kanwil DJKN Banten	ZI-WBBM	92,79	19	Kanwil DJKN DKI Jakarta	ZI-WBBM	93,03	20	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	ZI-WBBM	92,87
No	Unit Kerja	Predikat	Nilai																																																																																			
1	Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	ZI-WBK	92,61																																																																																			
2	Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara	ZI-WBK	91,91																																																																																			
3	Direktorat Transformasi dan Sistem Informasi	ZI-WBK	94,38																																																																																			
4	Kanwil DJKN Jawa Barat	ZI-WBK	89,99																																																																																			
5	KPKNL Bengkulu	ZI-WBK	96,55																																																																																			
6	KPKNL Bogor	ZI-WBK	90,53																																																																																			
7	KPKNL Jakarta I	ZI-WBK	90,08																																																																																			
8	KPKNL Jakarta III	ZI-WBK	93,96																																																																																			
9	KPKNL Jakarta IV	ZI-WBK	91,48																																																																																			
10	KPKNL Jayapura	ZI-WBK	92,94																																																																																			
11	KPKNL Kupang	ZI-WBK	85,87																																																																																			
12	KPKNL Padangsidimpuan	ZI-WBK	88,76																																																																																			
13	KPKNL Palembang	ZI-WBK	92,04																																																																																			
14	KPKNL Serang	ZI-WBK	93,43																																																																																			
15	KPKNL Singkawang	ZI-WBK	89,95																																																																																			
16	KPKNL Surakarta	ZI-WBK	93,44																																																																																			
17	KPKNL Yogyakarta	ZI-WBBM	93,43																																																																																			
18	Kanwil DJKN Banten	ZI-WBBM	92,79																																																																																			
19	Kanwil DJKN DKI Jakarta	ZI-WBBM	93,03																																																																																			
20	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	ZI-WBBM	92,87																																																																																			
2.	Penghargaan sebagai PPID Tingkat II Kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025.	 PIAGAM PENGHARGAAN Diberikan Kepada PPID Tingkat II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta Sebagai PPID Tingkat II Kategori Informatif Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat II di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2025 Menteri Keuangan Republik Indonesia  Purbaya Yudhi Sadewa																																																																																				

3.	Penghargaan Museum Rekor Dunia, Indonesia Nomor 12265/R.MURI/VII/2025 tanggal 9 Juli 2025. Atas rekor Lelang Sukarela Wastra Nusantara oleh Pejabat Lelang Kelas Dua Terbanyak yang dilaksanakan di Kanwil DJKN DKI Jakarta.	
4.	Penghargaan sebagai Penilai Pemerintah Ahli Madya Terbaik 2025 Sesuai nota dinas Direktir Transformasi dan Sistem Informasi nomor ND-1200/KN.8/2025 tanggal 18 Desember 2025 hal Penyampaian Piagam Penghargaan Pejabat Fungsional Tahun 2025 atas Kinerja Tahun 2024	
5.	Penghargaan kepada Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai Pengelola BMN atas Sinergi & Kerjasama Dalam Layanan Pemenuhan Ruang Kerja dan Pengelolaan Aset Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	

6. Piagam Eco Office Kategori PLATINUM selaku Satuan Kerja Pengelola Gedung Kanwil DJKN DKI Jakarta (Kanwil DJKN DKI Jakarta, KPKNL Jakarta I, KPKNL Jakarta II, KPKNL Jakarta III, KPKNL Jakarta IV dan KPKNL Jakarta V). Telah memenuhi syarat Penerapan Gedung Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan.	
--	--



DJKN

BAB IV

Penutup



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kanwil DJKN DKI Jakarta Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Kanwil DJKN DKI Jakarta selama tahun 2025 yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta dan rencana kerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, sekaligus pelaksanaan visi dan misi Kanwil DJKN DKI Jakarta serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029.

Capaian kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta pada tahun 2025 dapat dikatakan berhasil/baik. Secara umum kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2025 yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) dan sejalan dengan program anggaran berbasis kinerja mencapai 116,66% (memenuhi ekspektasi).
- b. Dari 20 (dua puluh) IKU *Kemenkeu-Two* Kanwil DJKN DKI Jakarta tahun 2025, seluruh IKU dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Semua yang dicapai saat ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara Kanwil DJKN DKI Jakarta dan KPKNL yang berada di wilayah kerjanya, dimana hal ini harus ditingkatkan pada tahun mendatang. Suatu tujuan tidak akan tercapai apabila tidak ada komitmen dan konsistensi yang telah direncanakan bersama. Untuk itu agar selalu berkomitmen dan konsisten maka dibutuhkan kerjasama, kebersamaan, sinergi dan kolaborasi seluruh aparat/jajaran di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta.

Disusunnya Laporan Kinerja Kanwil DJKN DKI Jakarta ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait, mengenai tugas dan fungsi Kanwil DJKN DKI Jakarta, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada masa mendatang. Semoga jajaran Kanwil DJKN DKI Jakarta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.



DJKN

L a m p i r a n



Lampiran 1

Perjanjian Kinerja Tahun 2025



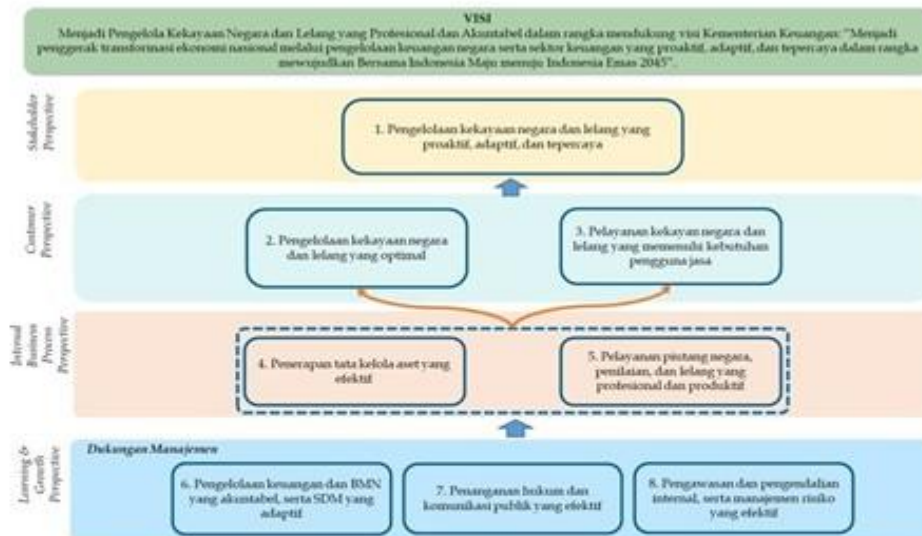
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-16/KN/2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Indeks integritas	100
		1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp664,53 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp12,92 T)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2,57 T)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program/Kegiatan 2025	Anggaran
Program:	
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp1,344,798,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp96,399,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp418,143,000
3. Pengelolaan Aset	Rp795,301,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp34,955,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp7,235,472,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp73,780,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp7,106,112,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp27,180,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp28,400,000

Jakarta, 30 Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya							
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	20%	50%	50%	70%	70%	100%	100%
1b-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1c-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp664,53 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp12,92 T)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp2,57 T)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
3a-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%

Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	lelang							
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Arif Bintarto Yuwono

Lampiran 2
Adendum Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-16a/KN/2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	1a-CP Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100%
		1b-CP Indeks integritas	100
		1c-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp664,53 M)
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp3,32 T)
		2c-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp12,92 T)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa	3a-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
		3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5b-CP Persentase produktivitas lelang	80%
		5c-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025	Anggaran
Program:	
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp1,344,798,000
Kegiatan	
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp96,399,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp418,143,000
3. Pengelolaan Aset	Rp795,301,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp34,955,000
Program:	
Dukungan Manajemen	Rp7,235,472,000
Kegiatan	
1. Legislasi dan Litigasi	Rp73,780,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp7,106,112,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp27,180,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp28,400,000

Jakarta, 9 Desember 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Dodok Dwi Handoko

**RINCIAN TARGET KINERJA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

[illegible]

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	negara							
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
7a-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, Serta Manajemen Risiko yang Efektif							
8a-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

Jakarta, 9 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Dodok Dwi Handoko

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, 9 Desember 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Dodok Dwi Handoko

Lampiran 3

Perjanjian Kinerja Tahun 2026

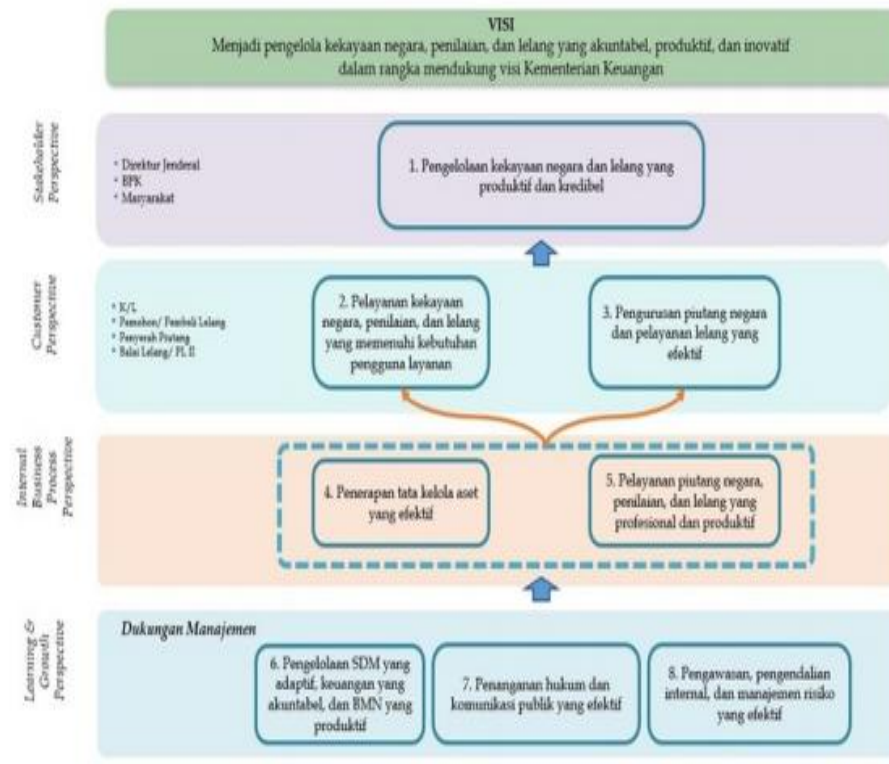


PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-16/KN/2026
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Produktif dan Kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp682,4M)
2	Pelayanan Kekayaan Negara, Penilaian, dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Layanan	2a-CP	Persentase Akurasi Data IGT Peta BMN Berupa Tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
		2c-N	Persentase standarisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%
3	Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp2T)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp12,5T)
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5	Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83
		8c-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	95,6%

Program/Kegiatan 2026

Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp1,790,128,000

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi Rp92,603,000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp547,495,000
3. Pengelolaan Aset Rp1,102,510,000
4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif Rp47,520,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp7,183,589,000

Kegiatan

1. Legislasi dan Litigasi Rp73,780,000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp7,020,964,000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Rp68,945,000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal Rp19,900,000

Jakarta, Januari 2026

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Dodok Dwi Handoko

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6	Pengelolaan SDM yang Adaptif, Keuangan yang Akuntabel, dan BMN yang Produktif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan, Pengendalian Internal, dan Manajemen Risiko yang Efektif							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83
8c-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	83%	87%	87%	92%	92%	95.6%	95.6%

Jakarta, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Dodok Dwi Handoko

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Jakarta, Januari 2026

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta



Ditandatangani Secara Elektronik
Dodok Dwi Handoko

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;
Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 411852 KANWIL DJKN DKI JAKARTA

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	9,156,753,000	0	7,517,543,822	1,108,649,622	8,626,193,444	94.21 %	530,559,556
CD Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	946,291,000	0	631,869,886	208,564,346	840,434,232	88.81 %	105,856,768
CD.4796 Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	39,430,000	0	22,776,000	11,305,000	34,081,000	86.43 %	5,349,000
AEF Sosialisasi dan Diseminasi	39,430,000	0	22,776,000	11,305,000	34,081,000	86.43 %	5,349,000
AEF.001 Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	17,910,000	0	4,956,000	9,461,000	14,417,000	80.50 %	3,493,000
AEF.002 Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	9,300,000	0	5,625,000	1,844,000	7,469,000	80.31 %	1,831,000
AEF.003 Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	12,220,000	0	12,195,000	0	12,195,000	99.80 %	25,000
CD.4797 Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	211,151,000	0	95,378,000	72,561,235	167,939,235	79.54 %	43,211,765
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	211,151,000	0	95,378,000	72,561,235	167,939,235	79.54 %	43,211,765
FAE.001 Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertipikasi	118,869,000	0	43,787,500	46,907,000	90,694,500	76.30 %	28,174,500
FAE.002 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	85,582,000	0	45,140,500	25,654,235	70,794,735	82.72 %	14,787,265
FAE.003 Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindaklanjut atas Pelaksanaan Lelang	6,700,000	0	6,450,000	0	6,450,000	96.27 %	250,000
CD.4798 Pengelolaan Aset	678,400,000	0	497,005,886	124,398,111	621,403,997	91.60 %	56,996,003
AAH Peraturan lainnya	160,723,000	0	87,521,059	57,899,063	145,420,122	90.48 %	15,302,878
AAH.001 Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	160,723,000	0	87,521,059	57,899,063	145,420,122	90.48 %	15,302,878
FAC Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara	15,610,000	0	12,826,500	1,525,000	14,351,500	91.94 %	1,258,500
FAC.004 Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	10,090,000	0	10,030,000	0	10,030,000	99.41 %	60,000
FAC.005 Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	5,520,000	0	2,796,500	1,525,000	4,321,500	78.29 %	1,198,500
FAE Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	129,667,000	0	77,863,702	29,376,700	107,240,402	82.70 %	22,426,598
FAE.004 Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	68,445,000	0	44,504,702	19,928,700	64,433,402	94.14 %	4,011,598
FAE.005 Rekomendasi Hasil Penilaian	40,336,000	0	12,874,000	9,448,000	22,322,000	55.34 %	18,014,000
FAE.007 Penggalian Potensi Lelang	20,886,000	0	20,485,000	0	20,485,000	98.08 %	401,000
FAK Pengelolaan Aset BUN	372,400,000	0	318,794,625	35,597,348	354,391,973	95.16 %	18,008,027
FAK.001 Aset BUN yang Dikelola	372,400,000	0	318,794,625	35,597,348	354,391,973	95.16 %	18,008,027
CD.4801 Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	17,310,000	0	16,710,000	300,000	17,010,000	98.27 %	300,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput;
Periode Desember 2025

Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Organisasi 09 DITJEN KEKAYAAN NEGARA
Satuan Kerja : 411852 KANWIL DJKN DKI JAKARTA

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
ACE Perizinan Profesi	17,310,000	0	16,710,000	300,000	17,010,000	98.27 %	300,000
ACE.001 Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	17,310,000	0	16,710,000	300,000	17,010,000	98.27 %	300,000
WA Program Dukungan Manajemen	8,210,462,000	0	6,885,673,936	900,085,276	7,785,759,212	94.83 %	424,702,788
WA.4700 Legislasi dan Litigasi	54,460,000	0	45,251,200	6,838,500	52,089,700	95.65 %	2,370,300
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	54,460,000	0	45,251,200	6,838,500	52,089,700	95.65 %	2,370,300
EBA.969 Layanan Bantuan Hukum	54,460,000	0	45,251,200	6,838,500	52,089,700	95.65 %	2,370,300
WA.4701 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	8,133,036,000	0	6,824,053,236	889,796,276	7,713,849,512	94.85 %	419,186,488
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,274,118,000	0	6,172,064,194	863,788,976	7,035,853,170	96.72 %	238,264,830
EBA.002 Kerumahtanggaan	80,730,000	0	55,069,148	6,394,496	61,463,644	76.13 %	19,266,356
EBA.994 Layanan Perkantoran	7,193,388,000	0	6,116,995,046	857,394,480	6,974,389,526	96.96 %	218,998,474
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	858,918,000	0	651,989,042	26,007,300	677,996,342	78.94 %	180,921,658
EBB.001 Peralatan Fasilitas Perkantoran	858,918,000	0	651,989,042	26,007,300	677,996,342	78.94 %	180,921,658
WA.4702 Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	13,170,000	0	10,063,500	2,155,500	12,219,000	92.78 %	951,000
BMB Komunikasi Publik	13,170,000	0	10,063,500	2,155,500	12,219,000	92.78 %	951,000
BMB.001 Pembinaan/Edukasi Publik	13,170,000	0	10,063,500	2,155,500	12,219,000	92.78 %	951,000
WA.4704 Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	9,796,000	0	6,306,000	1,295,000	7,601,000	77.59 %	2,195,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	9,796,000	0	6,306,000	1,295,000	7,601,000	77.59 %	2,195,000
EBD.001 Rekomendasi Kepatuhan Internal	9,796,000	0	6,306,000	1,295,000	7,601,000	77.59 %	2,195,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA